

ARSIP

MEDIA KEARSIPAN NASIONAL



ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



KESIAPAN PENYELENGGARAAN

KEARSIPAN

DALAM MENGHADAPI PEMINDAHAN

IBU KOTA NEGARA



EDISI 82 | TAHUN 2023



GERAKAN KEARSIPAN KE-52
GERAKAN KEARSIPAN
Menuju Birokrasi Maju,
Memori Kolektif Bangsa,
dan Peradaban Unggul

*Terima kasih
atas kerja sama semua pihak*

ARSIP NASIONAL RI

Kembali dinobatkan sebagai Badan Publik

INFORMATIF

oleh **KOMISI INFORMASI PUSAT RI**



Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip Nasional
Republik Indonesia

RUBRIK

04 DARI REDAKSI

9 **ARTIKEL LAPORAN UTAMA**
MASYARAKAT BERGERAK, MERINTIS GERAKAN
TERTIB ARSIP DAN SEJARAH DESA

PENYELAMATAN ARSIP KEMARITIMAN:
MENDOKUMENTASIKAN INDONESIA
POROS MARITIM DUNIA

15 **KHAZANAH**
ARSIP KONFERENSI GERAKAN NON BLOK I
SEBAGAI *MEMORY OF THE WORLD UNESCO*

GUTHA PERCHA KOMODITAS ANDALAN
SUKABUMI SEJAK PERANG DUNIA II

22 **PROFIL**
NORTIER SIMANUNGKALIT
SOSOK PEJUANG DAN
BAPAK PADUAN SUARA INDONESIA

27 **MANCANEGARA**
MENGENAL PUTRA JAYA
KOTA PEMERINTAHAN DI MALAYSIA

31 **DAERAH**
MELIHAT POTRET PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN DI KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI
KOTA PENYANGGA IKN

36 **HUKUM**
PENGUATAN REGULASI
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DALAM RANGKA PERPINDAHAN
IBU KOTA NEGARA

40 **CERITA KITA**
ARSIPARIS TELADAN

42 **LIPUTAN**



LAPORAN UTAMA 05

KESIAPAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DALAM MENGHADAPI PEMINDAHAN
IBU KOTA NEGARA



PRESERVASI 25

MENYIMPAN ARSIP DIRUMAH ?
TAK PERLU KUATIR LAGI !



TEKNOLOGI 34

PENGENALAN TEKNOLOGI
HANDWRITING TEXT RECOGNITION:
TRANSKRIBUS



Desain sampul : Aswin Budiarto

Pembina :

Kepala ANRI,
Sekretaris Utama,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab :

Florentinus Kristiartono

Pemimpin Redaksi :

Aria Maulana

Dewan Redaksi :

Hilman Rosmana
Bambang Parjono Widodo
M. Ihwan

Redaktur :

Susanti
Isanto
Intan Lidwina
Tiara Kharisma
Mudanto Pamungkas
Jajang Nurjaman
Erieka Nurlidya Utami

Editor :

Rayi Darmagara
Sitty Annisaa
Yosa Wisnu W.
Yuanita Utami
Rizal Bagus Rahman
Anwar Asyraf

Desain Grafis :

Hendri E. Zulkarnain
Aswin Budiarto
Wahyu Setyo Budi
Rani Rizki Amalia

Fotografer :

Muhamad Dullah
Lukman Nul Hakim

Sekretariat :

Krestiana Evelyn
Putri Iswayanti
Ridha Sari Maulida Pratiwi

 www.anri.go.id

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: humas@anri.go.id

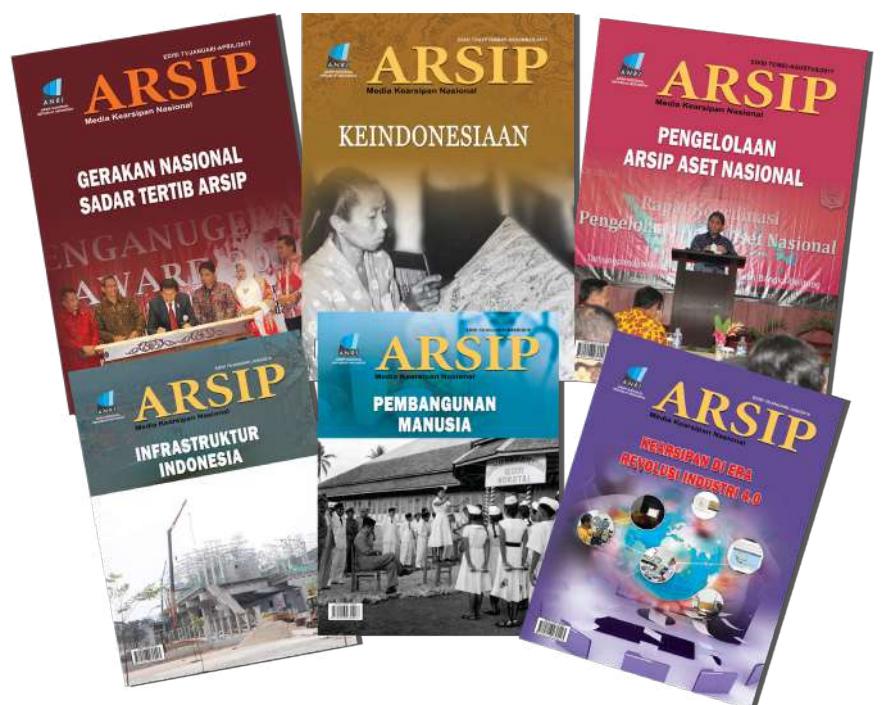
Berbagai kegiatan pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) terus berlangsung. Pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan fisik terkait bangunan atau gedung-gedung pemerintahan, melainkan pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru yang disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik. Pemindahan IKN tidak hanya berdampak pada aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan, namun juga berdampak terhadap aspek penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan beberapa turunannya, mengakibatkan perpindahan perangkat pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga dari Pulau Jawa ke Ibu Kota baru di Pulau Kalimantan. Perpindahan ini mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki oleh kementerian/lembaga baik sumber daya manusia, aset administrasi kegiatan pemerintahan, arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja pemerintah, dan lain-lain. Salah satu sumber daya kementerian/lembaga yang harus diselamatkan dan dikelola agar dapat digunakan secara berkelanjutan di Ibu Kota baru adalah arsip dinamis yang telah tercipta sebelumnya.

Pada tema kali ini majalah ARSIP mengangkat tema Kesiapan Penyelenggaraan Kearsipan dalam Menghadapi Pemindahan Ibu Kota Negara. Kami sajikan pula Rubrik Khazanah, Rubrik Daerah, Rubrik Mancanegara, Rubrik Hukum, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan mengenai berita-berita kearsipan yang menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi



KESIAPAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DALAM MENGHADAPI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Berbagai kegiatan pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) terus berlangsung, dimana fokus pembangunan saat ini adalah di kawasan inti pemerintahan yang luasnya sekitar 6.600 hektar. Kawasan inti pemerintahan itu menjadi pusat kegiatan pembangunan utamanya. Di dalam kawasan ini dapat ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian/Lembaga, dan juga hunian untuk ASN-Hankam.

Adapun infrastruktur utama yang tengah dikembangkan secara progresif pada pembangunan IKN antara lain adalah, area Istana Negara, pembagian kantor Kementerian dan perumahan aparatur sipil negara atau ASN. Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah alasan pembangunan Ibu Kota Nusantara

(IKN) dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 22 Februari 2023. Menurut Presiden RI, alasan utama dibangunnya IKN adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.

“Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan, tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekedar

pemindahan fisik terkait bangunan atau gedung-gedung pemerintahan, melainkan, pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik. “Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah Ibukota yang negara lain tidak memiliki, negara lain tidak memiliki,” tutur Presiden.

Presiden pun meyakini proyek IKN akan rampung dalam 15 hingga 20 tahun mendatang dan IKN akan menjadi kota pemerintahan. Sedangkan Jakarta, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara, Presiden RI menyebut Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi.

Sementara itu, dilansir melalui website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri PUPR, Basuki



LAPORAN UTAMA

Hadimuljono meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jumat (28/7/2023). Hingga saat ini progres konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap 1 telah mencapai 36% dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan.

Dalam tinjauannya, Menteri Basuki menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur IKN berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, bahkan ada beberapa progres pembangunannya yang lebih cepat dari rencana. Antara lain pembangunan bangunan Gedung Istana Negara, Kantor Presiden dan Penataan Sumbu Kebangsaan.

“Di depan kawasan Istana Presiden terdapat plaza dan lapangan upacara. Kita harapkan akhir Desember 2023 tempat upacaranya sudah selesai, sedangkan Istana Negara dan Kantor Presiden akan selesai pada Juli 2024. Sehingga Insya Allah jika Presiden berencana upacara 17 Agustus 2024 sudah bisa,” ungkap Menteri Basuki. “Kami fokus untuk pengembangan KIPP di Zona 1A karena Kementerian PUPR mendapat amanah untuk pembangunan infrastruktur dasar menggunakan dana APBN. Anggarannya sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini merupakan modal bagi Otorita IKN Nusantara untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi”, ungkapnya.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital



Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Kamis, 23 Februari 2023. Sumber : www.presidentri.go.id

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Prof. Mohammed Ali Berawi pada Rapat Koordinasi Penataan Arsip Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan bahwa pembangunan IKN dimasukkan dalam 5 tahap, dimana tahap pertama (2020-2024), akan dibangun istana negara, perkantoran kementerian, hunian pejabat negara dan pegawai, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Prof. Mohammed Ali Berawi menyampaikan bahwa sekitar 65% wilayah IKN akan menjadi wilayah *tropical forest* untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia. “Yang dibangun saat ini adalah wilayah area hutan produksi. *Baseline* kita tercapai artinya apa? Kita akan melakukan reforestrasi, *mentawir nursery*, temen-temen KLHK menyiapkan 15 juta bibit pohon untuk ditanam kembali, direforestrasi kembali di IKN. 65% *tropical forest*, 10% *green air*. Untuk *food production*, untuk taman-taman yang akan dibangun dan hanya

25% dibangun kotanya. Kalau 75% menjadi karbon *zink*, menyerap CO_2 . 25% nya kita kontrol emisi karbonnya, maka karbon netral, Insya Allah akan tercapai sebelum 2045. Ini *masterplan* nya IKN”, terang Ali Berawi.

Pemindahan IKN tidak hanya berdampak pada aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan, namun juga berdampak terhadap penyelenggaraan kearsipan secara nasional. Hal itu disampaikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto pada Rapat Koordinasi Penataan Arsip Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Ballroom Magzi, Hotel Grandkemang, Jakarta, (23/02).

“Ketika kita pindahan, keluarga kita pindah, rumah kita pindah, itu pasti ada yang kececer. Kemudian kita sering mengalami organisasi kita pindah juga ada yang kececer. Nah apalagi kalau sebuah ibukota yang pindah jaraknya yang jauh lagi. Ini

perlu sangat dipersiapkan dengan sangat matang, termasuk dengan kearsipan, karena arsip membawa efek hukum, membawa efek kinerja, membawa efek yang beruntun ke berbagai masalah bisa terjadi di bidang kearsipan. Tapi kita tidak boleh patah semangat, kita tetap semangat optimis kita akan tuntaskan program ini dengan sekuat tenaga kita”, ungkap Imam.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara salah satunya, mengakibatkan perpindahan perangkat pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga ke Ibu Kota baru. Perpindahan ini mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga baik sumber daya manusia, aset yang bergerak, bukti administrasi kegiatan pemerintahan, dan lain-lain. Salah satu sumber daya Kementerian/Lembaga yang harus diselamatkan dan dikelola agar dapat digunakan secara berkelanjutan di Ibu Kota baru adalah arsip.

Imam Gunarto menyampaikan bahwa ANRI bersama K/L yang akan pindah ke IKN harus menyamakan hati dan pikiran, gerak langkah dan aksi dalam membangun kearsipan, khususnya menuju IKN. Pekerjaan besar dan kolosal ini melibatkan



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jumat (28/7/2023). Sumber : www.pu.go.id

banyak K/L yang akan pindah, sehingga menjadi momen bersejarah yang akan dikenang anak cucu kita. “Proses ini harus dilaksanakan secara kolaboratif, tidak hanya ANRI dengan K/L saja tetapi dengan swasta, perguruan tinggi, dan komunitas bersama-sama bersinergi,” terang Imam Gunarto.

Lebih lanjut Imam menambahkan, tugas kita bersama adalah menata dan mendigitalisasi arsip dari 70 K/L yang akan pindah ke IKN dan menjamin arsip statis, terjaga, dan vital dapat terselamatkan. Kemudian menjamin arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak bernilai guna dimusnahkan sesuai prosedur. Ini tak lain untuk menjamin arsip, menjaga keberlanjutan administrasi kementerian/lembaga di IKN. “Momen perpindahan menuju IKN ini dapat menjadi momen tertib arsip, transformasi digital dan penyelamatan Memori Kolektif Bangsa (MKB) yang

efektif,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Prof. Mohammed Ali Berawi sangat mendukung terhadap transformasi digital kearsipan di IKN dalam mewujudkan pemerintahan yang modern.

“Pertama kali harus mempunyai database yang kuat, harus memiliki sistem kearsipan yang bagus, kenapa? karena sekarang teknologi adalah 4 (empat) hal yang harus dipenuhi, pertama kita harus adaptif, kita harus produktif, kita harus diplomatik, dan yang terakhir kita harus kompetitif. Kenapa ini penting? karena kalau bicara data, indeks kompetitif republik kita, tahun ini menjadi peringkat 42 dari seluruh negara. Salah satu indikator dari *ranking top universe* ini adalah efektivitas, efisiensi pemerintahan. Bagaimana *decision making* harus dibuat secara cepat, harus dibuat

LAPORAN UTAMA

secara responsif”, ungkap Mohammed Ali Berawi. “Oleh karena itu, saya sangat mendukung Kepala ANRI. Mari kita bersama-sama bangun sistem digital kearsipan”, tambahnya.

Kemudian, Imam Gunarto berharap dengan pemindahan IKN ini, dapat menjadi momentum dalam membangun penyelenggaraan kearsipan yang modern. “Dan tentu saja bagi Arsip Nasional, 2024 itu momen kita semua untuk mencapai tertib arsip dengan kualitas yang baik dan transformasi kita bisa dijalankan karena nanti bapak dan ibu tidak lagi berkomunikasi kedinasan surat-menyurat dengan email, dengan whatsapp tapi dengan satu aplikasi, aplikasi pemerintah yang Insya Allah keamanannya lebih terjamin karena tidak keluar dari sistem pemerintah. Aplikasi Srikandi ini sistem internal pemerintah yang menjamin seluruh aparatur pemerintah bisa berkomunikasi kedinasan menjalankan program-programnya itu secara aman di dalam satu lingkungan aplikasi pemerintah bukan aplikasi yang terbuka. Jadi ini aplikasi yang tertutup untuk jaringan pemerintah. Dan akhirnya jangan sampai proses pemindahan ibukota ini, kita menjadi kehilangan sejarah karena arsipnya ada yang hilang atau tercecer”, ujarnya.

Imam mengajak kepada seluruh pengemban tugas bidang kearsipan untuk bahu-membahu menyukseskan penataan arsip kementerian/Lembaga dalam menghadapi persiapan pemindahan IKN.

“Mari kita bersama, berkerja sama, kerja kolosal, kerja birokratif, tidak hanya ANRI dengan IKN tetapi nanti akan melibatkan swasta. Saya



Kepala ANRI, Imam Gunarto



Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Prof Mohammed Ali Berawi

”Momen perpindahan menuju IKN ini dapat menjadi momen tertib arsip, transformasi digital dan penyelamatan Memori Kolektif Bangsa (MKB) yang efektif”

sudah membentuk satu komunitas perusahaan swasta partisipan jumlahnya 96 perusahaan kearsipan yang nanti kita akan timbang semua. Kita sedang proses akreditasi,

proses sertifikasi kepada sumber daya di perusahaan tersebut. Saya ingin perusahaan-perusahaan yang membantu bapak ibu ketika proses pematangan dan pembinaan arsip ini dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang memang terqualifikasi dan itu akan dikontrol oleh ANRI, supaya nanti arsip yang ditata sesuai dengan standar”, terang Imam.

Akhirnya, melalui program penataan arsip kementerian/Lembaga dalam menghadapi persiapan pemindahan IKN ini, diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui program penataan arsip ini, diharapkan dapat menjaga dan melestarikan peradaban dan sejarah perjalanan bangsa secara utuh, terpercaya dan komprehensif.

MASYARAKAT BERGERAK, MERINTIS GERAKAN TERTIB ARSIP DAN SEJARAH DESA

...kita Bangsa Indonesia dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan dengan budaya yang sangat beragam, kekayaan seni budaya Bangsa Indonesia ini harus terdokumentasi dengan baik dan disajikan secara menarik sehingga meningkatkan kecintaan terhadap budaya bangsanya...

(Pidato Presiden Joko Widodo, Peringatan Hari Kearsipan ke-50 Tahun 2021)

Desa merupakan salah satu entitas terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom dalam mengatur urusan pemerintahannya di wilayahnya masing-masing. Walau dibatasi oleh batas geografis yang sempit, puluhan ribu desa menjadi rangka utama dalam menopang laju modernitas di perkotaan yang menjadi *metronome* kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran desa tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan aset berwujud (*tangible*) dalam bentuk produksi bahan pangan dan bahan baku industri, tetapi juga memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan aset tak berwujud (*intangible*) yaitu aneka ragam kearifan lokal yang menjadi sumber dari budaya dan jati diri bangsa. Namun demikian, dalam laju pertumbuhan ekonomi yang pesat, seringkali aset tak berwujud dalam bentuk kearifan lokal yang muncul secara alami pada ekosistem desa, menjadi tergerus dalam arus modernisasi dan industri serta ekspansi pengaruh budaya luar. Kutipan pidato Presiden Joko Widodo menyiratkan bahwa kekayaan keragaman seni budaya yang tersebar di seantero nusantara masih belum

terdokumentasi secara optimal dan perlu ada upaya khusus melalui sinergi antara pelaksana pemerintahan dan peran serta masyarakat. Dokumentasi keragaman seni budaya di lingkungan desa menghasilkan rekam jejak berupa arsip yang dapat menjadi sumber primer bagi penulisan sejarah sebuah desa.

Arsip dan Desa

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menunjukkan perhatian dari seluruh elemen bangsa terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil dalam NKRI, selain membantu pemerintah pusat mewujudkan pembangunan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pemerintahan yang akuntabel, juga diharapkan dapat melestarikan dan memajukan kebudayaan masyarakat desa. Hal itu juga merupakan salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang desa. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya praktik pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggungjawab. Praktik pemerintahan desa secara nyata dapat dilaksanakan

dengan menciptakan program kerja di lingkungan desa yang mengedepankan pembangunan di seluruh aspek kehidupan dan mendorong adanya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat desa.

Desa merupakan salah satu struktur pemerintahan otonom yang paling rendah dimana menangani urusan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat seperti status kependudukan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan pemerintah lainnya yang diimplementasikan di tingkat desa. Program pembangunan pemerintah yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah desa menggunakan APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang dikelola secara resmi oleh pemerintah desa. Keberhasilan pelaksanaan program kerja pemerintah desa harus terdokumentasi dalam sistem kerja dan administrasi yang baik walaupun dalam situasi keterbatasan sarana dan prasarana. Dokumentasi pembangunan desa yang tercipta wajib diwujudkan dalam rekam jejak berupa arsip dan dikelola sesuai dengan kaidah peraturan perundangan kearsipan. Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dimana salah satu wujudnya antara lain pelaksanaan sistem pengelolaan arsip yang sesuai dengan peraturan

perundangan, sehingga mampu menjamin ketersediaan arsip sebagai sumber informasi manajemen pemerintahan yang menunjang pelayanan masyarakat dan menjamin akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Pengembangan penyelenggaraan kearsipan di tingkat desa telah menjadi perhatian bagi instansi pemerintah yang bertugas di bidang kearsipan. Program pemerintahan untuk tingkat pemerintah desa dalam bidang kearsipan adalah penetapan Program Arsip Masuk Desa (AMD) oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Program ini secara resmi dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2009. Sebagai dasar pelaksanaan program tersebut, ANRI mengeluarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 08 Tahun 2009 tentang Program AMD, yang bertujuan untuk meningkatkan peran arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa. Program yang berjalan dalam kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 difokuskan kepada peningkatan kapasitas sekretaris desa sebagai penanggungjawab administrasi di lingkungan pemerintah desa. Program AMD dalam implementasinya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat yang diwakili oleh ANRI dan pemerintah provinsi yang diwakili oleh lembaga kearsipan daerah provinsi sebagai pendamping sampai dengan pemerintah kabupaten/kota yang diwakili oleh lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota sebagai pembina dan pengelola arsip desa yang memiliki nilai kesejarahan. Secara umum, program tersebut dapat berjalan namun dipandang belum menyentuh dokumentasi budaya dan kearifan lokal yang melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa

Pada tanggal 13 Maret 2020, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) dengan ANRI menandatangani naskah kesepahaman dan berkomitmen bersama untuk saling berkolaborasi meningkatkan pengelolaan kearsipan yang andal di tingkat desa dalam koridor pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan dan pelestarian kearifan lokal. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan naskah kesepahaman tersebut, Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT, Taufik Majid, menandatangani perjanjian kerja sama yang dilaksanakan di sela-sela seminar Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa pada tanggal 30 Maret 2022. Menteri Desa PDTT menyampaikan bahwa kerjasama ini mendukung sasaran-sasaran pada tujuan SDGs Desa antara lain Desa Damai Berkeadilan (SDGs Desa ke-16), Kemitraan Untuk Pembangunan Desa (SDGs Desa ke-17), dan Kelembagaan Desa Dinamis, Budaya Desa Adaptif (SDGs Desa ke-18). Sasaran-sasaran tersebut menargetkan tercapainya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan, informasi kondisi sosial dan ekonomi desa, ketersediaan data SDGs Desa, hingga tersedianya peta desa. Sasaran-sasaran tersebut menjadikan pengembangan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kearsipan sangat relevan di tingkat desa. Selain sebagai basis perencanaan pembangunan, pengembangan kegiatan kearsipan di tingkat desa juga akan mendorong pelestarian kekayaan sosial budaya desa, sebagai rekam jejak jati diri dan kearifan lokal desa dari masa ke masa. Sementara itu, Kepala ANRI menyampaikan bahwa dengan adanya kerja sama ini diharapkan akan muncul gerakan yang dapat menghadirkan kesadaran pentingnya arsip bagi masyarakat desa sebagai bukti akuntabilitas kinerja pemerintah desa dan memori kolektif desa sebagai sumber sejarah desa. Selain itu, dengan tertib arsip dan administrasi,

diharapkan desa dapat menggunakan data mutakhir yang terekam dalam arsip untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan atau pelaksanaan program. Kepala ANRI juga memberikan harapan bahwa kerja sama ini juga dapat menjadi pemantik dan gerakan bersama tertib arsip desa, tertib arsip keluarga dan peningkatan produktivitas penulisan sejarah desa yang menceritakan jejak sejarah keberhasilan pembangunan desa. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini kemudian mendorong lahirnya rumusan Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 22 Desember 2022 melalui Sosialisasi Surat Edaran Bersama Menteri Desa PDTT dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa. Gerakan ini juga mendapatkan dukungan secara positif dari kalangan akademisi dan tokoh komunitas yang memiliki perhatian terhadap perkembangan Bidang Kearsipan dan pedesaan seperti Rieke Dyah Pitaloka (Duta Arsip Indonesia), Sri Margana (Sejarawan Universitas Gadjah Mada), Muhidin M. Dahlan (Pegiat Komunitas Warung Arsip), Faizatush Sholikhah (Ketua Program Studi Vokasi Kearsipan UGM), dan Taufik Rahzen (Budayawan).

Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa pada dasarnya merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kolaborasi bersama dengan tujuan menciptakan memori kolektif desa yang menjadi bagian dalam memori kolektif bangsa. Pelaksanaan kearsipan diharapkan tidak lagi menggunakan cara lama berupa *top-down*, tetapi menggunakan cara baru *bottom-up*. Cara ini memungkinkan semua elemen masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif dalam membentuk memori kolektif desa yang menjadi elemen penting memori kolektif bangsa.

Salah satu konsentrasi gerakan ini yang melengkapi Program

AMD sebelumnya adalah upaya melestarikan memori kolektif Desa dari partisipasi aktif masyarakat dengan adanya pengumpulan sumber sejarah dan penulisan sejarah Desa secara mandiri. Upaya tersebut dapat dimulai melalui pengembangan kapasitas, pelatihan, dan pendampingan yang ditujukan kepada masyarakat Desa. Kegiatan ini tentunya tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa PDTT bersama Arsip Nasional RI, tetapi perlu didukung kegiatan pembangunan Desa lainnya dari unsur masyarakat, seperti para tokoh Desa, akademisi, dan komunitas masyarakat pemerhati perkembangan Desa. Partisipasi elemen lain di Bidang Kearsipan juga yang bersifat organik pada pemerintah daerah, seperti Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dibutuhkan untuk ikut serta mendukung gerakan ini sekaligus menampung produk-produk dokumentasi dalam bentuk arsip yang diciptakan oleh masyarakat desa.

Program Masa Depan

Surat edaran bersama yang sudah ditetapkan bersama memiliki tujuan antara lain penyelamatan arsip dan sejarah desa serta pemberdayaan masyarakat desa untuk ikut serta berkontribusi dalam Bidang Kearsipan. Untuk mewujudkan tertib arsip di lingkungan desa, masyarakat dapat berperan sebagai pelaksana ataupun pemberi dukungan kepada pemerintah desa. Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mencakup persiapan perlengkapan kegiatan, pembuatan dan penerimaan arsip, penataan dan pemberkasan arsip, perlindungan arsip, dan penyelamatan arsip. Sementara itu mewujudkan

terdokumentasinya sejarah desa, masyarakat desa dapat melakukan kegiatan sebagai berikut persiapan perlengkapan pengumpulan sumber sejarah desa, pengumpulan sumber sejarah desa, dan penulisan sejarah desa.

Agar gerakan ini dapat berjalan optimal, perlu dilakukan pembinaan-pendampingan-evaluasi terhadap Gerakan Tertib Arsip dan Sejarah Desa secara kolaboratif. Instansi pemerintah yang dapat berkolaborasi antara lain Kementerian Desa PDTT, ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dan para pendamping desa. Kolaborasi ini dapat diperluas dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi, Perpustakaan Nasional RI, perguruan tinggi negeri dan swasta, dan berbagai komunitas yang bergerak dalam bidang kearsipan serta pengembangan desa. Kepala ANRI menyampaikan pesan bahwa gerakan ini dapat menjadi program bersama dengan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mulai dari tahun 2023, ANRI bekerja sama dengan LKD provinsi dan kabupaten/kota dapat menggelar pemilihan desa dengan pengelolaan arsip dan penulisan sejarah terbaik di tingkat provinsi ataupun nasional.

Saat gerakan ini sudah mulai bergulir, diharapkan informasi yang tercipta dari tertib arsip dan sejarah desa dapat diregistrasi dan diunggah melalui portal arsip desa yang akan dibangun dan dilakukan sinkronisasi

antara portal jaringan informasi kearsipan nasional yang dikembangkan oleh ANRI dengan portal sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT. Informasi yang telah diunggah pada portal arsip desa itu diharapkan dapat menjadi pengingat kearifan lokal budaya masyarakat desa sekaligus daya jual bagi desa tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut tanpa melupakan jati diri. Portal ini juga dapat menjadi wahana *benchmark* antar satu desa dengan desa lainnya sehingga bisa terjadi interaksi dan pertukaran pengalaman.

Di masa yang akan datang, gerakan ini diharapkan dapat menjadi gerakan sosial yang secara aktif dimotori oleh masyarakat desa dan komunitas pemerhati desa yang muncul di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan sosial itu dapat diorganisasikan dari terbentuknya simpul-simpul komunitas secara mandiri di setiap desa yang terjaring informasi dan interaksinya dalam satu wadah jaringan secara nasional yang dibina dan didampingi oleh sektor-sektor pemerintahan terkait. Apabila gerakan ini sudah berjalan secara masif dan berkelanjutan, maka warisan dokumenter Bangsa Indonesia yang memiliki nilai luhur dan tinggi, akan terjamin keberadaannya dan menjadi warisan berharga untuk generasi masa depan serta memberikan sumbangsih peradaban bagi dunia. (AM)



Sejarah Desa

PENYELAMATAN ARSIP KEMARITIMAN: MENDOKUMENTASIKAN INDONESIA POROS MARITIM DUNIA

Tujuh tahun silam sudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kemaritimannya dalam acara Marine Environment Protection Committee (MEPC) di Gedung International Maritime Organization (IMO) London, Inggris (19/4/2016). Kala itu, Presiden Jokowi dengan tegas kembali menyatakan komitmennya bahwa di bawah kepemimpinannya akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menggemakan lagi Jalesveva Jayamahe, dan kembali ke jati diri sebagai negara maritim. Berbagai program strategis pun digagas, dirancang dan dijalankan Indonesia untuk mewujudkan tekad menjadi poros maritim dunia. Apalagi Indonesia sudah memiliki bekal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya kelautan yang besar.

Mengulas konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tentu tidak hanya sekadar membahas aspek kelautan. Ada banyak aspek yang turut terlibat dalam pembangunan proses maritim ini, seperti halnya aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Ini tak lain karena membangun negara maritim juga berarti mewujudkan lima pilar pembangunan poros maritim dunia yang mencakup, pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, berkomitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan,

serta pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.

Kearsipan dan Budaya Maritim

Isu pembangunan kembali budaya maritim terus menguat seiring dengan digagasnya komitmen Presiden Jokowi yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Akan tetapi tidak dipungkiri, meski identitas bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa maritim, seiring berjalannya waktu budaya maritim terdegradasi sejak sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka. Degradasi tersebut di antaranya teridentifikasi adanya perubahan orientasi kultural masyarakat dari laut ke darat yang direpresentasikan oleh berubahnya orientasi perniagaan dari maritim ke darat, sejalan dengan melemahnya kekuatan ekonomi masyarakat lokal

(pada zaman sebelum Indonesia Merdeka) dan sistem pembangunan nasional sampai lokal yang lebih berorientasi pada darat daripada laut (Octavian dan Yulianto, 2014).

Selain itu, keterbatasan budaya maritim, khususnya bagi generasi muda di Indonesia juga disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, M. Firman Hidayat pada saat Rakor Penyelamatan Arsip Kemaritiman di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) (12/06/2023). Menurutnya, generasi muda saat ini masih terbatas mengetahui atau berbicara tentang budaya dan karakter bangsa Bahari. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi alasan pemajuan budaya dan bangsa Bahari menjadi salah satu agenda prioritas dalam Agenda Pembangunan Maritim 2045.

Keseriusan menjalankan agenda prioritas untuk pemajuan budaya dan karakter bangsa Bahari memerlukan strategi untuk penguatan budaya literasi maritim, inovasi dan kreativitas dengan berbagai program pengembangan budaya maritim dan literasi kelautan untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Berbicara budaya maritim dan

karakter bangsa, juga tak lepas dari warisan budaya yang dapat menjadi sumber informasi yang dapat membawa pesan masa lampau. Sumber informasi tersebut menjadi salah satu bahan yang dapat dipelajari dan dimaknai masyarakat, sehingga dapat turut mempengaruhi identitas dan memberi makna kehidupan sehari-hari. Dari berbagai macam sumber informasi, arsip menjadi salah satu sumber informasi sekaligus warisan budaya terdokumentasi yang merekam dan menginformasikan bentuk-bentuk tinggalan budaya maritim. Tetapi pertanyaannya, sudahkah Indonesia memiliki arsip yang mencerminkan budaya maritim yang utuh?

Arsip kemaritiman yang dapat mencerminkan karakter dan jati diri bangsa Indonesia dari masa lampu erat kaitannya dengan pengelolaan arsip statis kemaritiman baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Kepala ANRI, Imam Gunarto pada saat Rakor Penyelamatan Arsip Kemaritiman di ANRI (12/06/2023), harus diakui bahwa kinerja kearsipan tentang kemaritiman masih belum

maksimal untuk bisa membentuk mozaik sejarah Indonesia sebagai negara poros maritim. Arsip yang tersimpan di ANRI sebagian besar arsip tentang sejarah negara daratan. Ini jelas menggambarkan bahwa keberadaan khazanah arsip statis terkait kemaritiman masih minim. Padahal, arsip ini menjadi sumber informasi penting yang mampu menggambarkan budaya maritim Indonesia dari waktu ke waktu.

Oleh karenanya, dalam membangun pemajuan budaya dan bangsa Bahari, sudah selangkahnya juga beriringan dengan melaksanakan penyelamatan dan pelestarian arsip kemaritiman. Seperti halnya yang disampaikan M. Firman Hidayat bahwa kegiatan penyelamatan arsip kemaritiman menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi maritim di masyarakat tetapi tidak hanya literasi. Bahkan nantinya tidak hanya mendorong memelihara budaya maritim, tetapi dapat pula berdampak untuk mendorong perubahan perilaku dan inovasi maritim.

Bukti dan Dokumentasi Poros Maritim Dunia

Tekad mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia telah diprogramkan dalam 9 (sembilan) Agenda Pembangunan Maritim 2045. Agenda tersebut mencakup Pengembangan Sarana Prasarana Maritim, Peningkatan Konektivitas Maritim, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perairan, Pembangunan Industri Maritim, Penguatan Pertahanan, Keamanan dan

Keselamatan Maritim, Penguatan Diplomasi Maritim, Penguatan Tata Kelola Maritim, Pemajuan Budaya dan Karakter Bangsa Bahari, serta Pengembangan Iptek dan Sumber Daya Manusia Maritim. Agenda-agenda tersebut tentunya akan melahirkan berbagai program dan kegiatan strategis yang menjadi bagian dari proses upaya Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis tersebut sudah semestinya akan menghasilkan arsip dalam berbagai format yang merekam seluruh peristiwa apa saja yang telah dan akan diupayakan bangsa Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Catatan informasi yang terekam dalam arsip pelaksanaan agenda pembangunan, selanjutnya dapat menjadi bukti dan dokumentasi untuk ingatan atau memori kolektif tentang apa yang telah dialami dan dihadapi suatu bangsa dari masa ke masa.

Urgensi catatan informasi yang terekam dalam arsip pun turut diamini Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana yang turut menyampaikan bahwa dengan pengarsipan juga menjadi salah satu cara untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pengarsipan yang baik akan membantu mempermudah diterimanya Negara Kepulauan oleh masyarakat internasional melalui suatu Perjanjian Internasional. Apalagi Indonesia memiliki kepentingan terkait Negara Kepulauan sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Juanda.

4 (empat) alasan kuat untuk pengarsipan pun ditegaskan Prof.



Hikmahanto, pertama saat The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) diimplementasikan dalam bentuk perundingan dengan negara tetangga pemerintah memiliki berbagai dokumen terkait formulasi pasal. Kedua, arsip dapat digunakan sebagai bukti bila sengketa muncul dan berujung di lembaga peradilan. Ketiga, melalui arsip, para negosiator Indonesia dapat memahami ruh dari formula pasal sehingga mereka tidak terkecoh dengan narasi negosiator negara tetangga. Keempat, melalui arsip lah generasi muda yang tidak turut dalam perundingan memahami secara baik dibuatnya berbagai ketentuan.

Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab saat berbicara bukti dan dokumentasi agenda Pembangunan maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?

Kolaborasi

Merujuk pada regulasi, tepatnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tugas negara di bidang kearsipan diemban oleh ANRI. Namun, kondisi ini tak berarti serta-merta seluruh penyelamatan arsip kemaritiman menjadi sepenuhnya tanggung jawab ANRI. Pada regulasi yang sama, setiap pencipta arsip memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, mulai arsip tersebut diciptakan sampai dengan disusutkan. Ini artinya, pencipta arsip yang dapat terdiri dari lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan juga turut



Pelabuhan pasar ikan di Teluk Betung
Sumber : ANRI, Kempen Sumsel 520623 DD 13

andil untuk menyelamatkan arsip kemaritiman.

Pesan kolaborasi untuk menambah khazanah arsip kemaritiman di ANRI dan Lembaga Kearsipan juga diamanatkan secara terang-terangan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat Rakor Penyelamatan Arsip Maritim (12/06/2023). Seluruh instansi pusat dan daerah dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri untuk mengumpulkan dan menyelamatkan arsip kemaritiman ke ANRI dan lembaga kearsipan daerah.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dukungan dan partisipasi aktif berbagai tingkatan jelas dibutuhkan untuk mendukung ANRI dan lembaga kearsipan di daerah dapat memberikan bahan informasi kearsipan sejarah

kemaritiman bangsa Indonesia. Ini artinya, kolaborasi dengan berbagai pihak turut menjadi kunci untuk menyelamatkan arsip kemaritiman sebagai bukti dan dokumentasi perjuangan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Tak hanya itu, komitmen dan integritas pun dibutuhkan agar para penyelenggara negara yang memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan maritim juga turut menyadari dan bertanggung jawab, bahwa segala bukti dan dokumentasi yang tercipta memiliki kontribusi besar dalam hal mewariskan informasi untuk pemajuan budaya dan karakter bangsa Bahari. (TK)

ARSIP KONFERENSI GERAKAN NON BLOK I

SEBAGAI MEMORY OF THE WORLD UNESCO

Oleh Rini Rusyeni

Tak kenal maka tak sayang.... yuk kita berkenalan dengan khazanah arsip di ANRI. Ada banyak informasi yang terkandung dalam khazanah arsip yang tersimpan ANRI, bahkan informasi tersebut telah dianugerahi sebagai warisan dunia.

Tahukah kamu...pada akhir Mei 2023, UNESCO telah menetapkan 64 warisan dokumenter yang dimiliki oleh negara-negara di seluruh dunia. 64 warisan dokumenter ini merupakan warisan dunia dan memiliki signifikansi penting dalam sejarah perjalanan dunia dari masa lalu sampai dengan masa sekarang dan merupakan rekam jejak pengetahuan bagi generasi mendatang. Di antara 64 warisan dokumenter dunia tersebut, terdapat 3 warisan dokumenter milik Indonesia yang menjadi bagian dari memori dunia, yaitu, Hikayat Aceh, arsip Pidato Presiden Sukarno pada Sidang PBB di New York dengan judul *"to build the world anew"* dan arsip Konferensi I Gerakan Non-Blok tahun 1961. Di antara ketiga warisan dokumenter Indonesia yang bersejarah tersebut, khasanah arsip Konferensi I Gerakan Non Blok memiliki arti yang sangat penting tidak hanya bagi Indonesia sebagai negara penggagas Gerakan Non Blok, tetapi juga memiliki arti yang luas bagi negara-negara anggota Non-Blok bahwa gerakan yang dahulu mereka gagas

pada tahun 1961 memiliki signifikansi luar biasa dan berkontribusi kepada dunia tidak hanya di masa lalu, tetapi juga di masa sekarang dan bahkan di masa yang akan datang. Konferensi Pertama Gerakan Non-Blok (GNB) ini diadakan di Beograd, Yugoslavia yang diprakarsai oleh Ghana, India, Indonesia, Republik Emirates Arab dan Yugoslavia. Pertemuan ini menandakan peran aktif Negara Dunia Ketiga untuk mengurangi ketegangan dunia yang saat ini masih diliputi oleh perang dingin, menyerukan diakhirinya kolonialisme, imperialisme dan rasisme, serta mempromosikan koeksistensi damai dan perdamaian dunia.

Sampai saat ini, organisasi gerakan Non Blok masih aktif berperan serta dalam upayanya untuk terus memperjuangkan ketidakadilan, pengentasan kemiskinan dan juga perdamaian dunia. Selama 60 tahun keberadaannya sampai dengan saat ini, Gerakan Non Blok telah menghimpun 120 negara, 17 pengamat, 10 organisasi internasional. Gerakan Non Blok telah

mencakup 4,3 miliar orang (57% dari populasi dunia), dan 54,53 juta km² wilayah dunia.

Khazanah arsip Konferensi Pertama Gerakan Non Blok yang telah menjadi *Memory of the World* UNESCO terdiri dari 76 arsip tekstual berisi mengenai dokumen rekaman persiapan penyelenggaraan konferensi, dokumen pembahasan dalam konferensi, *final communique* konferensi serta korespondensi dengan negara-negara pemrakarsa konferensi milik ANRI, Kementerian Luar Negeri Indonesia, National Archives of Serbia, National Archives of Algeria. Di antara dokumen tekstual tersebut, terdapat juga potongan berita dan laporan pers yang disimpan di National Archives of Algeria dan National Archives of India. 242 foto merekam peristiwa serta momen pada saat konferensi. Selain itu juga, perjalanan Presiden Sukarno menuju Beograd, foto para delegasi yang sedang mengikuti konferensi juga terekam dalam khazanah arsip foto yang di ANRI, National Archives of Serbia dan National Archives of



Foto : Suasana Sidang Konferensi I GNB (Sumber-Sumber Khasanah GNB 1: Kementerian Luar Negeri, No. 70.11)

Algeria. Terdapat 1 arsip audio milik National Archives of Serbia dan 15 film yang berisi mengenai rekaman jalannya konferensi GNB I di Beograd yang direkam oleh delegasi dari Indonesia dan juga stasiun televisi Serbia. Semua rekaman suara serta video ini dalam kondisi yang sangat baik.

Khazanah arsip ini menyimpan memori kolektif dari lima negara penggagas, 20 peserta dan 3 negara peninjau. Mereka dinominasikan sebagai memori daftar dunia karena signifikansi internasional mereka yang mendokumentasikan tujuan pertukaran ide tentang masalah internasional dengan maksud untuk memberikan kontribusi yang lebih efektif bagi perdamaian dunia, keamanan dan kerjasama damai antara orang-orang, kebebasan, kesetaraan dan keadilan sosial untuk promosi kemakmuran, dan mempersempit antagonisme kedua blok yang sedang bersengketa pada masa itu.

Konferensi GNB I adalah terobosan negara-negara dunia ketiga untuk tidak berpihak pada blok manapun (non-blok). Konferensi ini menunjukkan bangkitnya kekuatan Negara-negara Dunia Ketiga, di antara dua *super power* lain yang ada saat itu (Blok Barat dan Blok Timur) untuk ikut serta secara aktif terhadap situasi yang tidak menguntungkan di dunia. Apalagi kehadiran negara-negara non blok sebagai peserta konferensi GNB I membuktikan adanya legitimasi bahwa walaupun negara-negara ini terpinggirkan dalam kancah percaturan dunia, tetapi negara-negara ini independen dan memiliki hak untuk menentukan sikap mereka terhadap dunia. Ini merupakan cara bagi negara-negara Dunia Ketiga tersebut untuk menjaga kedaulatannya karena sebagai negara yang baru merdeka, mereka tentu telah berkedudukan setara dengan negara lain yang telah lebih maju dan merdeka. Konferensi GNB I ini memberikan kemudahan bagi

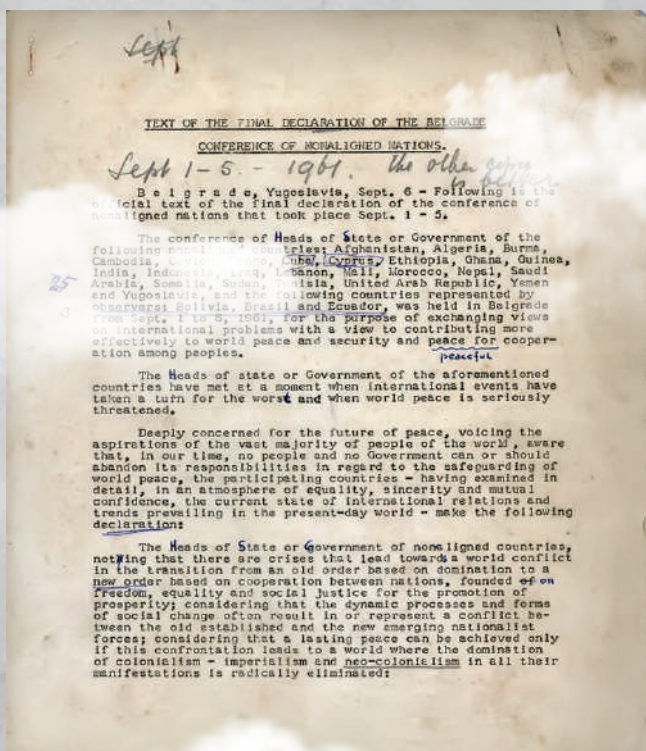
mereka untuk lebih dikenal di mata dunia.

Dampak politik dari GNB I adalah upaya PBB untuk meredakan Perang Dingin yang dilaksanakan ketika PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 255 pada tanggal 19 Juni 1968

tentang Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir. Dalam hal ini, Dewan PBB mengakui bahwa agresi dengan senjata nuklir atau ancaman terhadap negara-negara yang tidak bersenjata nuklir akan menciptakan situasi di mana Dewan Keamanan PBB serta negara-negara anggota yang memiliki senjata nuklir harus segera bertindak sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan Piagam PBB.

Resolusi tersebut disetujui oleh semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet hal ini ditandai dengan pertemuan antara Presiden Richard Nixon (Amerika Serikat) dengan Leonid Brezhnev (Uni Soviet) untuk menandatangani perjanjian *SALT (Strategic Arms Limitation Treaty)* di Finlandia pada tahun 1969. Dampak lebih lanjut pada sisi ekonomi, negara-negara Barat telah mengisyaratkan kesediaan mereka untuk berdialog setelah Konferensi Beograd dan jumlah negara pascakolonial di PBB meningkat, pemerintah Asia, Afrika, dan Amerika Latin berhasil masuk ke PBB. Pada pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juli dan Agustus 1962, mereka menyerukan akses yang lebih mudah ke pasar global bagi negara-negara berkembang, stabilisasi harga komoditas, dan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). UNCTAD akhirnya berlangsung antara 23 Maret dan 16 Juni 1964 di Jenewa.

Khazanah arsip GNB I mencatat bahwa terdapat 2,000 delegasi dari 121 negara yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut. Jumlah peserta yang begitu besar merupakan sebuah



rekor tersendiri untuk sebuah penyelenggaraan konferensi pada masa itu. Dalam pertemuan itu seluruh negara berkembang yang hadir berkumpul untuk membentuk Kelompok 77 dalam upaya memperkuat posisi mereka dalam percaturan dunia internasional. Untuk pertama kalinya, negara-negara berkembang yang sangat heterogen dari Asia, Afrika dan Amerika Latin, ditambah Serbia, bersatu padu membentuk organisasi permanen yang bertujuan untuk mempromosikan kepentingan negara berkembang.

Arsip Konferensi GNB I merekam inisiatif Presiden Sukarno (Indonesia), Josip Broz Tito (Yugoslavia), Pandit Jawaharlal Nehru (India), Gamal Abdul Nasser (Egypt), and Kwame Nkrumah (Ghana) dalam menggagas pertemuan besar ini. Dalam gagasan mereka yang tercatat pada arsip ini, bahwa mereka menginginkan adanya Kerjasama dalam bidang kebijakan politik di antara negara-negara berkembang untuk menciptakan dunia tanpa segregasi, kolonialisme, dan perang. Lebih jauh lagi, mereka memiliki pandangan yang sama untuk

memerangi kemiskinan, khususnya bagi negara-negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Presiden Sukarno, Nehru, Nasser dan Nkrumah adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam melawan kolonialisme.

Rekaman informasi dalam arsip GNB ini merupakan saksi sejarah dimana dalam konferensi ini negara-negara lintas benua seperti Asia, Afrika dan Eropa Bersatu padu bekerjasama, saling membantu satu sama lain untuk mengatasi situasi dunia yang pada saat itu sangat tidak menguntungkan. Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 1-6 September 1961 dan dihadiri oleh banyak negara seperti: Afghanistan, Aljazair, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Iraq, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia dan Yugoslavia.

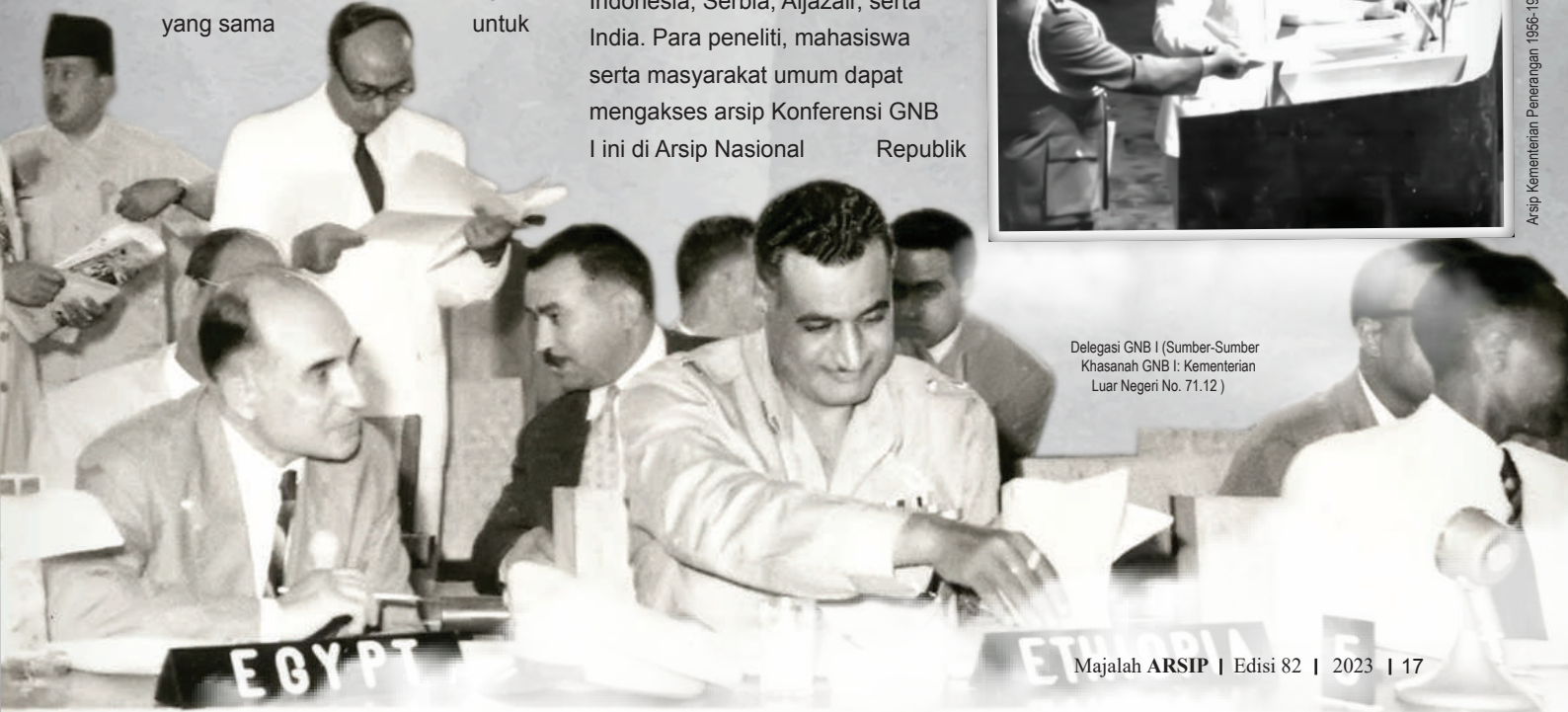
ANRI telah menyusun *Guide* khasanah arsip GNB yang merupakan gabungan dari khasanah arsip dari beberapa negara seperti: Indonesia, Serbia, Aljazair, serta India. Para peneliti, mahasiswa serta masyarakat umum dapat mengakses arsip Konferensi GNB I ini di Arsip Nasional Republik

Indonesia cq. Ruang Baca ANRI. Untuk akses guide arsip ini dapat mengunjungi laman ANRI: www.anri.go.id atau <https://mow.anri.go.id/>.

Warisan Dokumenter dunia lain milik ANRI yang juga patut untuk kita kenal lebih jauh lagi adalah arsip Pidato Sukarno "To build the World Anew". Khasanah ini berisi mengenai dokumentasi pidato Presiden Sukarno yang disampaikan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-15 pada tanggal 30 September 1960 di New York, Amerika Serikat. Tapi... cerita detailnya tidak sekarang ya.. karena akan ada banyak kisah dan pengetahuan menarik di dalam khasanah ini yang sayangnya tidak akan cukup jika diceritakan dalam tulisan ini. Untuk sekarang teman-teman arsip semua yang ingin tahu arsipnya seperti apa, silahkan untuk juga mengunjungi laman ANRI di link di atas ya. Tunggu artikel khasanah berikutnya ya...



Delegasi GNB I (Sumber-Sumber Khasanah GNB I: Kementerian Luar Negeri No. 71.12)



GUTTA PERCHA

KOMODITAS ANDALAN SUKABUMI
SEJAK PERANG DUNIA II

Oleh Gayatri Kusumawardani



Foto: Istimewa

Tahukah anda para pembaca artikel ini, apakah bahan baku pembuat bola golf dan sol sepatu karet? Bahan baku dari sol sepatu dan bola golf tersebut adalah *gutta percha* atau getah perca (bahasa latinnya adalah *Palaquium gutta*). Menurut jurnalasia.com *Gutta percha* adalah tanaman tropika yang tumbuh di kawasan Asia Tenggara sampai Australia Utara. Dari Taiwan Utara sampai Kepulauan Solomon Selatan. Di beberapa tempat, *gutta-percha* punya sejumlah nama lain, seperti Getah Merah, Isonandra Gutta, Gutta Soh, Gutta Seak, dan Red Makassar. *Gutta perca* diperoleh dengan cara ekstraksi daun dan penyadapan pohon. Tanaman ini secara ilmiah termasuk rumpun *Plantae*, *Ordo Ericale*, *Family Sapotaceae*, dan *Genus Palaquium Blanco*. Ketinggian tanamannya mencapai sekitar 5-30 meter, berdiameter lebih dari 1 meter. *Gutta percha*

berdaun rimbun berwarna hijau kekuningan. Bunganya berwarna putih kecil-kecil dalam satu kuntum. Sementara buahnya berukuran 3-7 cm yang berisi 1-4 biji.

Pada suhu biasa, *gutta percha* adalah benda keras. Namun jika dipanaskan pada suhu 65 derajat celcius, benda ini akan melunak dan dapat dikepal-kepal tangan untuk dibentuk sesuka hati. Tanaman ini pertama kali diperkenalkan ke Eropa pada 1843 oleh William Montgomery, dan mulai masuk pasaran dunia pada 1856.

Sampai 1896, *gutta percha* yang digunakan untuk insulasi

kabel dasar laut mencapai 16.000 ton yang terentang sepanjang 184.000 mil laut di sekitar pantai benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, pantai timur dan barat Afrika. Karena kebutuhan pasar dunia tinggi, Pemerintah Kolonial

Hindia Belanda mulai melakukan penelitian *gutta percha* di Perkebunan Cipetir, Sukabumi, pada 1885. Salah satu tindakannya adalah menanam beberapa varietas pohon *gutta-percha* untuk diseleksi.



Surat Retroacta Kommissoriaal van den 17 October 1884 No. 200811, tentang pembukaan lahan di Tjipetir salah satunya untuk penanaman tanaman *Gutta Percha* atau Getah perca. Di dalam surat ini terdapat nama-nama tanaman yang akan ditanam di perkebunan ini, Salah satunya adalah tanaman Getah perca.

Pada tahun 1901 kebutuhan *gutta percha* dunia semakin tinggi, menjadi potensi ekonomi tinggi dan meningkatkan devisa negara induk Belanda dari daerah jajahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pun membangun perkebunan negara *gutta percha* di Cipetir, Sukabumi.

Pendirian perusahaan perkebunan *gutta percha* di Cipetir Sukabumi memiliki latar sejarah tersendiri. Penemuan material karet *gutta percha* di Malaysia oleh John Tradescant pada tahun 1656 menjadi salah satu pemicunya. Kemudian pemanfaatan *gutta percha* di Eropa yang dipelopori oleh Dr. W. Montgomery tahun 1843 di Inggris mengawali didirikannya pabrik *gutta percha* di Singapura yang berproduksi secara besar-besaran pada abad ke-19 (Collins, 1878), menjadi inspirasi utama Melchior Treub, *Direktur 's Lands Plantetuin* (Kebun Raya Bogor), mengembangkan penelitian tentang spesies tanaman ini di Indonesia. Pada tahun 1885, *gutta percha* ditanam di Kebun Cipetir Sukabumi sebagai kebun percobaan yang pada akhirnya menjadi kebun produksi

berkelanjutan.

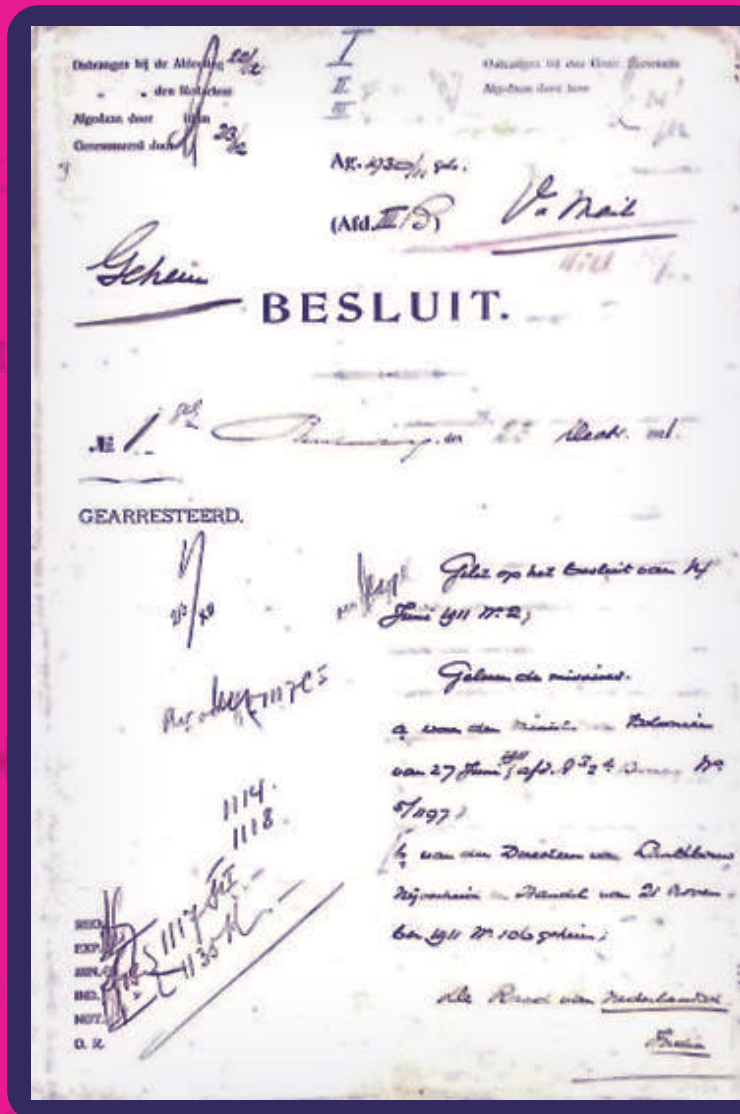
Kebun Cipetir sebagai kebun percobaan pada awal pendiriannya, berada dibawah 's *Lands Plantetuin*. Kebun percobaan ini mengalami kesuksesan sehingga di tahun 1901 didirikan Perkebunan *Gutta Percha* Cipetir milik *Indische*

bagian dari *s'Lands Caoutchouch Bedrijf* (Badan Usaha Milik Negara). Pendirian Pabrik Cipetir pertama kali atas inisiatif Tromp de Haas, kemudian dilanjutkan oleh H. van Lennep (Administratur Kebun Cipetir) pada tahun 1921.

Memasuki zaman kemerdekaan (1945) dan nasionalisasi

perusahaan asing di tahun 1957/1958, produksi Cipetir terus berjalan. Akan tetapi di tahun 1975-1984 produksi sempat dihentikan karena permintaan mengalami penurunan. Keadaan ini karena banyak bermunculan penemuan material sintetis baru yang dapat menggantikan fungsi *gutta percha*. Pada tahun 1985 produksi berjalan lagi karena permintaan dari dunia internasional mengalami peningkatan. Pada tahun 1986, PTP XI melakukan efisiensi produksi dengan melakukan rehabilitasi pabrik terhadap peralatan yang ada, serta modifikasi peralatan dengan mesin dan peralatan baru.

Situs perkebunan Tjipetir atau Cipetir terletak di Sukabumi, merupakan kebun pertama di Jawa Barat yang memproduksi *gutta percha*. Perkebunan tersebut secara manajerial saat



Berkas *besluit* 23 Maart 1911. Berkas *besluit* 23 Maart 1911 berisi tentang Rekomendasi pendirian Pabrik Getah perca oleh *Departement van Landbouw Nuyverheit en Handel*. Di dalam *besluit* tersebut berisi surat menyurat atau korespondensi antara direktur Tjipetir dengan pemerintah Hindia Belanda dalam hal ini *Departement van Landbouw*.

Staatliche Guttapercha-plantage "Tji Petir" atau *Gouvt. Getah-pertja aanplant* atau *Onderneming Tjipetir* sehingga pada tahun 1914 menjadi

ini merupakan kebun *afdeling* dari Perkebunan Sukamaju PTPN VIII. Nama *gutta percha* atau getah perca dari Bahasa Melayu yang merupakan gabungan dari kata getah dan perca. Getah adalah bentuk bahannya, sedangkan perca nama pohon penghasilnya (Usri, Nina Djustiana, Elin Karlina, 2015:12).

Perkebunan Cipetir, tidak dapat dipisahkan dari tiga perkebunan yang sekarang sudah menjadi satu manajerial perusahaan, yaitu Perkebunan Sukamaju, Perkebunan Parakansalak, dan Perkebunan Cislak. Perkebunan Sukamaju atau *Onderneming Sukamadju*, dengan pemilik awal N.V Landbouw Mij “Sukamadju” Surabaya. Lokasi kebun terletak sekitar 1,5 Km dari halte Cibadak, di pinggir jalan raya dari Cibadak ke Bogor, dengan produksi karet dan the. Perkebunan Cipetir atau *Onderneming Tjipetir* di tahun 1970-an adalah milik Pemerintah Negara RI. Lokasi kebun berada di pinggir jalan dari Cibadak menuju Cikidang, sekitar 12 Km dari Halte Cibadak (Ismet, 1970: 121-122).

Kebun Sukamaju telah berdiri sejak tahun 1915 oleh pengusaha Belanda. Pada tahun 1934 dengan Administratur F.J.J de Blocq van Scheltinga, Kebun Sukamaju memiliki luas area konsesi 1.119 ha dengan komoditas teh, karet, dan Albizia. Pada zaman



Foto pohon *gutta percha* yang ditanam di Perkebunan Tjipetir (KIT Jawa Barat No. 647.20)



Foto lempengan *gutta percha* sebagai bahan setengah jadi untuk bahan pembuat bola golf, sol sepatu, instalasi kabel bawah laut, penunjang alat kesehatan, dan lain-lain (KIT Jawa Barat No.647.2)

pendudukan Jepang (1942-1945) perkebunan mengalami penurunan produksi. Kemudian di tahun 1948-1957 kembali dikuasai Belanda sampai dinasionalisasi oleh Pemerintah RI di tahun 1957. Perkebunan Sukamaju dan Perkebunan Cipetir merupakan

perkebunan besar yang telah berdiri sejak zaman Hindia Belanda.

Pabrik gutta perca Cipetir merupakan bangunan lama Belanda yang memiliki peran penting dalam memproduksi komoditas ekspor di masa lalu dan masa kini. Pabrik tersebut telah berdiri sejak pertengahan abad ke-19 dan sampai sekarang masih beroperasi. Produksi pabrik Cipetir berupa lempengan atau kepingan karet *gutta percha* putih bertuliskan “Tjipetir”, sebagai bahan setengah jadi untuk bahan pembuat bola golf, sol sepatu, instalasi kabel bawah laut, penunjang alat kesehatan, dan lain-lain. Bahkan dulu dipakai untuk keperluan perang dunia dan untuk keperluan kedokteran gigi.

Pada tahun 2020 bangunan pabrik Cipetir berada di lokasi *emplasemen Afdeling* Cikidang Perkebunan Sukamaju. Perkebunan Sukamaju merupakan gabungan dari tiga perkebunan besar mas Hindia Belanda, yaitu Perkebunan Sukamaju, Perkebunan Cipetir dan

Perkebunan Cislak. Perkebunan Sukamaju menjadi kebun induk dan perkebunan lainnya menjadi kebun *afdeling*.

Bangunan, mesin, dan peralatan pabrik masih bertahan sampai sekarang dan masih bisa berfungsi

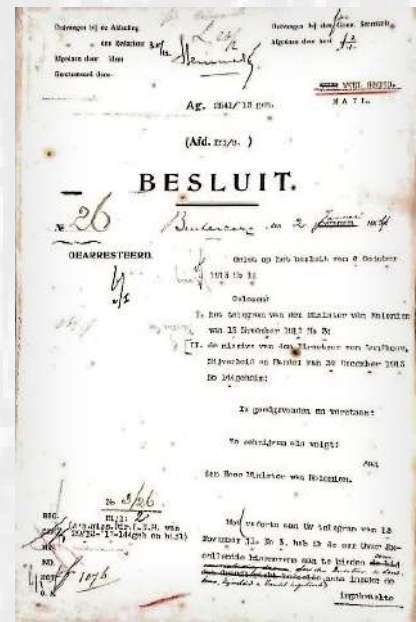
meskipun beberapa mesin sudah tidak dipakai. Mesin dan peralatan yang masih digunakan diantaranya seperti lima batu granit sebagai alat penggilingan konvensional yang berasal dari Italia, bejana pemasak bungkil (hasil olahan gilingan daun gutta), bangunan pabrik mekanik, bangunan pabrik kimiawi (ekstraksi), mesin pencetak kepingan gutta, mesin vacuum, dan lain sebagainya. Selain itu area kebun gutta percha lama masih memproduksi sampai sekarang seperti kebun produksi Cipetir, kebun produksi dan kebun biji Cicareuh, dan lain-lain.



Foto pekerja pabrik yang sedang mengolah gutta percha menggunakan mesin di Pabrik Tjipetir (KIT Jawa Barat No. 647.44)



Foto Pabrik Tjipetir circa 1930 (KIT Jawa Barat No. 648.85)



Besluit No. 26 Tanggal 21 Januari 1914 beserta lampirannya berisi tentang teknik pembudidayaan getah perca dan pembuatan ekstrak getah perca yang dikembangkan oleh Dr. Tromp de Haas.

Setelah membaca arsip-arsip tersebut, pengetahuan tentang asal muasal sol sepatu yang kita pakai, bola golf, instalasi kabel bawah laut, dan lain-lain menjadi bertambah. Bahan sederhana seperti getah perca bisa menghasilkan kabel bawah laut yang menjadi proyek besar PT. Telkom Indonesia. Banyak yang belum mengetahui tentang si gutta percha ini. Padahal kegunaannya sangat besar. Oleh karena itu

pabrik Tjipetir sebagai saksi sejarah tentang gutta percha harus dilestarikan. Demikian pula dengan arsip-arsip tentang gutta percha yang menjadi bagian dari khazanah Arsip Nasional RI yang perlu dijaga, dirawat dan dilestarikan dengan baik. Perlu juga diperkenalkan tentang arsip-arsip gutta percha agar orang semakin “melek” tentang khazanah arsip yang ada di Arsip Nasional RI.

NORTIER SIMANUNGKALIT

SOSOK PEJUANG DAN
BAPAK PADUAN SUARA INDONESIA

Oleh Mudanto Pamungkas

Berbicara mengenai paduan suara di Indonesia tentunya tidak bisa melupakan sosok Nortier Simanungkalit.

Hal itu tidak lepas dari perannya dalam dunia seni paduan suara di Indonesia, baik sebagai pencipta lagu, penggubah aransemennya, dirigen, juri, pendiri grup paduan suara, maupun sebagai guru paduan suara. Sebagian besar karya musiknya diciptakan untuk kegiatan paduan suara. Kiprahnya dalam seni paduan suara tidak hanya dikenal di Indonesia, namun juga di manca negara.

Nortier Simanungkalit atau biasa dikenal dengan sebutan N. Simanungkalit lahir di Tarutung pada tanggal 17 Desember 1929. Meski tidak pernah memperoleh pendidikan musik secara formal, namun bakatnya dalam bermusik sudah terlihat dari anak-anak. Pada saat Jepang mulai menduduki Indonesia di tahun 1942, Simanungkalit tengah menempuh Pendidikan kelas 6 *Hollandsch Inlandsche School (HIS)*. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di *Kanri Yosei Gakko* selama 3 tahun hingga tahun 1945.

Pejuang Kemerdekaan

Gelora kemerdekaan turut menyeret anak-anak muda seperti N. Simanungkalit untuk bergabung dengan badan-badan perjuangan. Ia kemudian bergabung dengan TRI Divisi VI yang dipimpin oleh Kolonel Mohammad Din di Sibolga dan Batangtoru. Pada saat di Pulau Jawa terjadi pemberontakan PKI Madiun, N. Simanungkalit turut tergerak untuk ikut menumpas anasir-anasir PKI di Tapanuli dengan membentuk dan menjadi komandan Pasukan Pelajar Pembela Pancasila (P3S). Ketika di daerah Tapanuli dibentuk Tentara Pelajar (TP), N. Simanungkalit ditunjuk menjadi kepala stafnya. Pada bulan Desember 1948 Belanda melakukan Agresi Militer II maka TP Tapanuli yang berada di bawah komando Sub

Teritorium VII yang dipimpin oleh Letkol A.E. Kawilarang melaksanakan perang gerilya. Pada masa ini N. Simanungkalit diangkat sebagai komandan dengan pangkat kapten, pangkat tertinggi di TP Sumatera. Selama kurang lebih satu tahun TP Tapanuli melakukan perang gerilya di pedalaman Sumatera Timur. Ketika perang gerilya usai, para anggota TP kembali ke kota. Sebagai Komandan TP Sub Teritorium VII, N. Simanungkalit kemudian mengeluarkan surat perintah kepada anggotanya yang duduk di kelas I dan II SMA untuk melanjutkan studi di Yogyakarta. Sedangkan untuk anggota TP yang masih belajar di SMP agar melanjutkan studi SMA di kota Padangsidempuan, Tarutung, Balige, atau Medan. N. Simanungkalit sendiri kemudian melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran, namun kemudian pindah ke Fakultas Sastra, Pedagogik, dan Filsafat (Fakultas SPF) UGM.

Pejuang Seni Suara

Selama di Yogyakarta bakat bermusik N. Simanungkalit semakin terasah. Pada tahun 1955 bersama Umar Kayam mendirikan paduan suara mahasiswa Gama. Satu tahun kemudian, ia memimpin paduan suara dan orkes simfoni Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Yogyakarta. Pada tahun 1957, N. Simanungkalit bersama konduktor kondang dari Rusia, Nicolai Varfolomojeff, memimpin koor besar dengan 600 pelajar dan diiringi orkes simfoni musisi-musisi Yogyakarta dalam rangka menghormati komponis Cornel Simanjuntak. Kesuksesan

pentastaran tersebut menggugah kemunculan kelompok-kelompok paduan suara di Yogyakarta. Sejak saat itu Yogyakarta dikenal sebagai kota pusat paduan suara pelajar dan mahasiswa di Indonesia.

Searah dengan kebijakan Presiden Soekarno yang menentang penetrasi budaya Barat melalui musik *ngak-ngik-ngok* di Indonesia maka N. Simanungkalit bersama mahasiswa Gama dan pegawai urusan kesenian



“
Menentang penetrasi budaya Barat melalui musik *ngak-ngik-ngok*”
”

Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (PP dan K) mendirikan Pusat Olah Vokal (POV) pada tanggal 17 Januari 1963. Arah perjuangan POV sebagai berikut:

1. Menjadikan seluruh rakyat Indonesia mencintai dan menghayati lagu-lagu rakyat dan lagu-lagu perjuangan, serta lagu/musik seni sebagai salah satu bagian dari perjuangan seni budaya dan mempertahankan kepribadian Indonesia melalui seni budaya.

2. Menjadikan POV yang dipancarkan dari kota budaya Yogyakarta sebagai contoh pembentukan paduan suara di seluruh Indonesia.

Sebagai organisasi seni, POV telah melahirkan tokoh-tokoh seni terkemuka di Indonesia seperti Pranawengrum Katamsi (Ibu Seirosa Indonesia) dan Laksamana Pertama TNI dr. Amoroso Katamsi, Sp. K.J, M.M. seorang aktor film (pemeran Soeharto dalam film *Serangan Fajar* dan *Penumpasan Pengkhianatan G 30 S/PKI*). Anggota-anggota POV lainnya juga mendirikan kelompok paduan suara seperti Bahana Patria, Gelora Patria (kemudian bergabung menjadi Gelora Bahana Patria), Kartika Candra Kirana, Eka Sasana Jaya, Sasana Vokalia, dan masih banyak lagi lainnya.

Sebagai mantan pejuang kemerdekaan, N. Simanungkalit membawa semangat berkesenian di lingkungan ABRI. Ia pernah melatih paduan suara Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta dan Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang pada tahun 1964 – 1965. Bahkan menurut rencana akan melaksanakan konser besar gabungan karbol AAU dan taruna AMN untuk memperingati HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1965. Namun rencana besar tersebut gagal akibat Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Selain itu, N. Simanungkalit juga melatih paduan suara Tri Ubaya Cakti Kodam VII/Diponegoro.

Pada tahun 1966 N. Simanungkalit diangkat oleh Menteri PP dan K sebagai kepala Dinas Musik. Dengan jabatan tersebut



ia memiliki keleluasaan untuk menyebarkan seni paduan suara di sekolah-sekolah dan kampus. Selain itu, pada tahun 1968 N. Simanungkalit juga diangkat sebagai *President Indonesian National Music Committee* dan anggota *International Music Council UNESCO*. Oleh karena itu, ia menjadi wakil Indonesia dalam acara *Asian Music Rostrum* di Alma Ata, Republik Kazakhstan. Pada tahun 1971, ia diangkat oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K sebagai Ketua Badan Pembimbing Musik Mahasiswa (BPMM). Melalui jabatan tersebut N. Simanungkalit dapat menghadiri *The Third International University Choral Festival* di kantor pusat PBB, New York. Dua kegiatan tersebut merupakan sedikit contoh kegiatan musik di manca negara yang dihadiri oleh N. Simanungkalit.

Tetap Setia di Jalur Musik Sampai Akhir Hayat

Ketika musisi lainnya lebih suka menciptakan lagu-lagu pop yang komersil, N. Simanungkalit tetap setia di jalur paduan suara. Lagu-lagu ciptaannya merupakan lagu yang tidak komersil dan cocok untuk dinyanyikan sebagai lagu paduan suara. Selama sebagai pencipta lagu telah lebih dari seratus lagu yang diciptakannya, baik yang diciptakan murni atas inisiatif sendiri maupun pesanan dari institusi/perusahaan/organisasi. Lagu karyanya yang sering menjadi lagu wajib dalam perlombaan paduan suara antara lain *Puing*, *Renungan Ibu di Hari Tua*, dan *Warisan I, II, III*. Sedangkan contoh lagu yang merupakan karya pesanan

antara lain *Hymne dan Mars Dharma Putra Kostrad*, *Hymne dan Mars Golkar*, *Hymne dan Mars PDI*, *Mars Pupuk Iskandar Muda*, *American Red Cross*, *Hymne dan Mars Dharma Wanita Persatuan*, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebagai orang Batak, N. Simanungkalit juga menciptakan lagu-lagu berbahasa Batak. Selain itu, N. Simanungkalit menciptakan musik pengiring senam kesegaran jasmani (SKJ) yang sangat populer di lingkungan sekolah dan instansi pemerintah pada era 1980-an sampai 1990-an.

Selain sebagai pencipta lagu, N. Simanungkalit juga dikenal sebagai penggubah lagu untuk paduan suara. Telah ratusan lagu digubah dan diaransemen ulang untuk dinyanyikan dalam bentuk paduan suara. Jika dikelompokkan lagu-lagu gubahannya terdiri atas lagu nasional, lagu pop, lagu daerah, lagu asing, lagu rohani, dan lagu pesanan. Lagu-lagu gubahannya sering ditampilkan pada berbagai acara aubade.

Pemahaman N. Simanungkalit yang mendalam atas seni musik dan olah vokal menjadikannya sebagai guru musik dan vokal di banyak tempat. Beberapa penyanyi terkenal Indonesia juga pernah mengikuti les privat olah vokal kepada N. Simanungkalit sebut saja

Hetty Koes Endang, Iis Sugianto, Diana Nasution, Rita Butar-butar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, N. Simanungkalit juga menjadi konsultan musik di berbagai institusi, pembicara pada berbagai seminar musik baik nasional maupun internasional, serta juri dalam berbagai perlombaan paduan suara tingkat nasional. Boleh dikatakan sebagian besar hidup N. Simanungkalit dihabiskan dalam kegiatan musik oleh karena itu tidak heran jika puluhan piagam penghargaan dianugerahkan kepadanya.

N. Simanungkalit tutup usia pada tanggal 9 Maret 2012, bertepatan dengan hari Musik Nasional. Almarhum dimakamkan pada tanggal 13 Maret di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan inspektur Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto. Tyasno Sudarto merupakan murid N. Simanungkalit pada kelompok paduan suara Gelora Patria.

Melihat begitu besar ketokohan N. Simanungkalit pada dunia musik di Indonesia tidak berlebihan jika ANRI berkepentingan untuk menyelamatkan arsip beliau. Maka dari itu sejak pertengahan bulan Februari hingga pertengahan Maret 2023 Kelompok Substansi Akuisisi III melakukan kegiatan pendataan dan pemberkasan arsip di kediaman beliau di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Semoga dengan diakuisisinya arsip N. Simanungkalit dapat memperkaya khazanah arsip statis di bidang seni yang tersimpan di ANRI.

MENYIMPAN ARSIP DI RUMAH? TAK PERLU KUATIR LAGI!

Oleh Anwar Asyraf

Halo Sobat Arsip! Di dalam artikel tentang preservasi kali ini, akan ditulis tentang bagaimana cara menyimpan arsip di rumah. Setiap kegiatan yang kita lakukan pastinya akan menghasilkan arsip, yang beberapa diantaranya penting sekali, seperti ijazah, akta lahir, akta jual-beli dan lain-lain. Hal tersebut mendorong pemilik arsip untuk menyimpan arsip, agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Menyimpan arsip kedengarannya memang mudah, tetapi itu merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan karena kita perlu memperhatikan cara menyimpan arsip yang benar, sehingga arsip yang disimpan dapat ditemukan kembali dengan mudah ketika dibutuhkan dan diselamatkan apabila terjadi bencana atau hal yang tidak

diinginkan. Berikut adalah cara yang kita perlukan untuk menyimpan arsip di rumah.

Yang pertama adalah kita harus **menyiapkan** lemari besi untuk menyimpan arsip. Tujuannya adalah agar lemari tersebut akan tahan serangga dan awet dari kerusakan. Lemari yang rentan rusak nantinya akan berpengaruh terhadap isinya, termasuk arsip. Oleh karena itu, kita perlu **menyiapkan** lemari besi yang **sesuai dengan standar** untuk melindungi arsip kita dari faktor eksternal¹ perusak arsip.

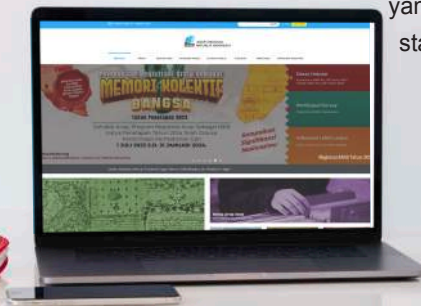
¹ Faktor perusak arsip dari luar, diantaranya adalah suhu, kelembapan, serangga, *handling* arsip yang kurang baik dan manusia.

Selain lemari, kita juga harus **menyiapkan *document keeper*** yang sesuai standar, artinya



Lambang plastik PP, PET dan PVC

plastik *document keeper* yang digunakan harus berasal dari plastik PP (*Polypropylene*) atau PET (*Polyethylene Terephthalate*). *Document keeper* yang menggunakan plastik PVC (*Polyvinyl Chloride*) disarankan untuk tidak digunakan karena plastik jenis tersebut tidak ramah untuk arsip, yang akan berakibat pada menempelnya arsip dengan plastik ketika keduanya

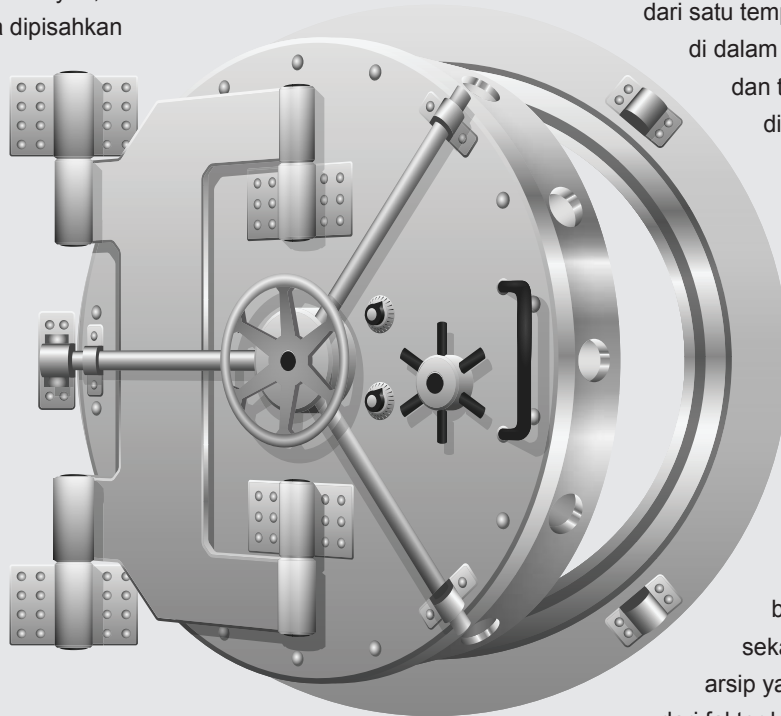


bersentuhan dalam jangka waktu yang lama, terutama jika arsip tersebut memiliki foto di dalamnya. Pastikan Sobat Arsip **membaca informasi produk** sebelum membeli *document keeper* ya!

Setelah kita memiliki keduanya, kita dapat **menyortir** seluruh arsip yang kita miliki di rumah. Arsip asli harus **dipisahkan** dengan arsip kopi. Selanjutnya, kita sebaiknya mengelompokkan arsip berdasarkan pemilik, jenis dan tanggal diterimanya arsip, jadi arsip ijazah milik ayah, ibu dan anak sebaiknya dipisahkan dengan penggunaan ***document keeper*** yang berbeda dan disusun berdasarkan waktu arsip tersebut diterima (yang diterima terlebih dahulu diletakkan di bagian depan), tujuannya adalah kita dapat menemukan kembali arsip yang kita perlukan dengan cepat dan meminimalisir tertukarnya arsip. Penempatan arsip di dalam *document keeper* sebaiknya satu arsip satu plastik *document keeper*. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar arsip yang disimpan tidak menempel satu sama lain ketika disimpan di suhu dan kelembapan yang tinggi. Suhu di Indonesia dikategorikan tidak ramah untuk arsip, karena suhu dan kelembapannya tinggi sebagai dampak dari iklim tropis di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melindungi arsip yang disimpan dengan perhatian dan penanganan khusus. Jangan lupa untuk membuat daftar arsip di setiap *document keeper*,

untuk mengetahui dengan mudah apa saja isi arsip di dalamnya. *Document keeper* dapat ditempatkan di dalam tas atau lemari besi yang sudah disiapkan sebelumnya.

Tempat kita menyimpan arsip juga harus diperhatikan. Tempat penyimpanan arsip yang baik adalah tempat yang **terbebas dari debu, serangga, cahaya matahari, serta suhu dan kelembapan yang tinggi**. Tempat menyimpan arsip juga harus **jauh dari jangkauan anak-anak, mudah**



ditemukan dan dijangkau orang dewasa. Tujuannya adalah agar arsip mudah ditemukan dan diselamatkan ketika bencana terjadi atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk perlindungan ekstra, kita dapat **mendigitalkan** arsip yang kita miliki dengan melakukan **scanning** dengan aplikasi-aplikasi gratis yang tersedia. Arsip yang sudah didigitalisasi dapat disimpan di komputer atau laptop dan dikategorikan berdasarkan pemilik,

jenis dan tanggal diterima arsip. Digitalisasi ini penting untuk dilakukan agar kita dapat menggunakannya dengan cepat apabila kita harus meng-*upload* arsip tersebut secara online untuk kepentingan tertentu dan untuk meminimalisir penggunaan arsip asli untuk hal yang tidak terlalu penting. Arsip digital juga dapat digunakan sebagai sarana *back-up* dari seluruh arsip yang kita miliki, sehingga kita tidak perlu khawatir jika arsip asli kita rusak. Pastikan kita menyimpan arsip digital ini di lebih dari satu tempat, dapat disimpan di dalam *computer*, *hard-disk* dan tempat penyimpanan digital, seperti Google cloud, I-Cloud, Dropbox dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir hilangnya arsip dari perangkat yang rusak atau hilang. Perlu untuk diketahui bahwa kita harus melakukan pengecekan secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk melihat apakah arsip yang kita simpan aman dari faktor kerusakan arsip.

Nah, mudah bukan? Apabila semua proses ini sudah kita lakukan, kita dapat merasa tenang karena kita sudah melindungi arsip kita dengan baik di rumah. Kita juga akan terbebas dari masalah kerusakan arsip dan tidak khawatir lagi ketika bencana tiba-tiba terjadi. Sampai jumpa di artikel tentang perlindungan arsip selanjutnya!.

MENGENAL PUTRAJAYA

KOTA PEMERINTAHAN DI MALAYSIA

Oleh Dharwis W.U. Jacob, S.S., M.Si

Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 32.730.000 jiwa pada tahun 2020. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali dari antara raja negara-negara bagian yang diperintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda Yang diPertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri.

Malaysia sebagai negara federal yang sebelumnya didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946 sebagai Uni Malaya. Seiring berjalannya waktu, Uni Malaya tersebut disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih

kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Pada 16 September 1963, sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514, dalam proses dekolonisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya.

Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula etnis Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing

menjadi bahasa dan agama resmi negara. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota D-8 (Developing-8), yakni sebuah kesepakatan untuk kerja sama pembangunan delapan negara anggotanya: Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Wilayah Putrajaya adalah pusat administrasi (pemerintahan federal) Malaysia yang menggantikan posisi Kuala Lumpur. Putrajaya Didirikan pada 19 Oktober 1995. Putrajaya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra dan juga menjadi wilayah persekutuan Malaysia yang ketiga (2 wilayah lainnya adalah Kuala Lumpur dan Labuan). Wilayah Putrajaya sekarang ini diambil dari Wilayah Selangor sebesar 46 km². Kota ini terhubung dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) serta Kuala Lumpur dengan KLIA Transit. Secara teknis, Malaysia tidak memindah ibu kota. Sesuai konstitusi, Kuala Lumpur masih menjadi ibu kota negara. Putrajaya hanya difungsikan sebagai pusat pemerintahan yang baru. Dengan statusnya yang hanya pusat pemerintahan, Putrajaya tidak menanggung beban terlampau berat.

Putrajaya menjadi cara baru Pemerintah Federal Malaysia untuk mengatasi kepadatan penduduk di Kuala Lumpur. Kota modern yang terencana itu dikembangkan dari sepetak kebun karet dan kelapa sawit yang berantakan. Lokasinya hanya 25 kilometer di selatan Kuala Lumpur yang tetap menjadi ibu kota nasional. Putrajaya difungsikan sebagai ibu kota administratif dan pusat lembaga peradilan dan banyak kantor pemerintahan lainnya. Meskipun terjepit di antara Kuala Lumpur yang merupakan salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di dunia dan kota bersejarah Malaka.

Putrajaya sebagai kota pemerintahan tentunya masih dalam proses pembangunannya juga. Ketika memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, pemerintah Malaysia memberikan insentif untuk pegawainya yang pindah ke Putrajaya. Mulai dari penambahan insentif gaji hingga pemberian rumah dinas. Perbadanan Putrajaya (lembaga yang mengurus kota) mengatur semua area tempat tinggal (dibagi dalam beberapa area yang disebut dengan *presint*). Setiap *presint* memiliki sekolah (bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari area perumahan), rumah sakit, masjid/surau dan infrastruktur pendukung lainnya. Saat ini jumlah penduduk di Putrajaya 120.000 orang dan pemerintah menargetkan jumlah penduduk sebanyak 360.000 orang di tahun 2025.

Sebelumnya, Putrajaya adalah lahan perkebunan karet dan kelapa sawit yang bernama Prang Besar. Kemudian pada tahun 1990an,

Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tun Dr Mahathir Mohamad, memulai pembangunan daerah tersebut menjadi sebuah kota. Alasannya, Kuala Lumpur sudah terlalu padat sehingga pusat pemerintahan Malaysia perlu dipindahkan ke tempat lain. Sejak pembangunannya selesai pada 1999 hingga kini, Putrajaya menjadi pusat pemerintahan yang sangat dinamis. Dengan bangunan-bangunan berarsitektur indah dan tata kota yang rapi, Putrajaya dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat sekaligus penyangga Kuala Lumpur sebagai ibu kota. Pembangunan kawasan baru ini cukup berhasil karena dalam prosesnya, pemerintah Malaysia memperhatikan segala aspek kehidupan. Pemerintah Malaysia tidak hanya membangun gedung-gedung perkantoran namun juga sistem transportasi, perumahan, dan rumah ibadah. Selain itu, bangunan-bangunan yang ada di Putrajaya senantiasa mengedepankan prinsip hemat energi air dan listrik. Banyaknya kedutaan besar yang berlokasi di Putrajaya serta banyaknya kunjungan pemimpin negara luar ke Putrajaya menjadikan kota ini salah satu representasi dari negara Malaysia.

Pusat kota Putrajaya ditandai arsitektur kontemporer yang terinspirasi desain Islam tradisional. Gedung pencakar langit yang berkilauan dihiasi pola Arab bermotif geometris atau bunga. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin atau yang dikenal dengan sebutan masjid besi memperlihatkan arsitektur baja dan kaca mutakhir yang biasanya Anda temukan di Tokyo

atau Beijing. Demikian pula modern *Putrajaya Convention Centre*, sebuah kreasi avant-garde yang terinspirasi Pending Perak atau ikat pinggang perak regalia kerajaan para sultan Melayu.

Kota ini juga merupakan rumah bagi satu-satunya masjid merah muda di dunia, yaitu Masjid Putra. Arsitektur bangunan ini dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan Islam, seperti pintu masuk utama terinspirasi dari pagar bangunan wilayah Persia, menara setinggi 116 meter terinspirasi dari menara Syaikh Omar di Baghdad, dinding basement yang terinspirasi dari Masjid Sultan Hassan di Maroko, dan hampir seluruh bangunan serta kubahnya terbuat dari susunan batu granit berwarna rose.

Putrajaya juga memiliki museum mengesankan, pusat perbelanjaan besar, dan salah satu lanskap kota terbersih dan ter hijau di Asia karena 37% lahannya didedikasikan untuk taman dan publik terbuka. Membangun kota ini dari nol memberi banyak peluang inovasi. Tujuan Mahathir awalnya adalah menjadikan Putrajaya sebagai pusat kota paling ramah lingkungan dan paling modern. Awalnya, Putrajaya dimaksudkan untuk berkembang menjadi kota

berpenduduk 350.000 orang dan sekitar 500.000 pekerja yang datang-pergi setiap harinya. Kota ini ditujukan sebagai tempat memamerkan warisan dan identitas Malaysia yang ramah lingkungan. Namun, daya tarik abadi dari Kuala Lumpur membuat pertumbuhan populasi Putrajaya lebih lambat dari yang diharapkan. Kini kota ini sangat menyenangkan bagi penduduk setempat dan turis yang mencari tempat istirahat dari hiruk pikuk Kuala Lumpur. Putrajaya tetap menjadi kota metropolitan yang luas tapi sepi dengan penduduk yang hanya berjumlah 120.000 orang.



Pusat kota ini berada di tengah Danau Putrajaya, di pulau sepanjang 4 kilometer dengan lebar 2 kilometer. Putrajaya dikelilingi oleh danau buatan yang dinamakan sesuai dengan nama kota, yaitu Tasik Putrajaya. Danau seluas 650 hektar tersebut berfungsi sebagai penyeimbang modernisasi pembangunan agar tidak panas dan gersang sekaligus sebagai wahana rekreasi. Danau ini memiliki tepi laut sepanjang 38 kilometer, sebagian besar dilengkapi taman, jalur jogging, dan jalur sepeda.

Putrajaya Botanical Garden merupakan taman botani terbesar di Malaysia yang memiliki lebih dari 7.000 spesies tanaman dari wilayah Afrika dan Asia Pasifik. Taman seluas 92 hektar ini terbagi menjadi tiga bagian,



Putrajaya Botanical Garden, Putrajaya, 2023.

yaitu tanaman hias (*ornamental plants*), tanaman bunga, serta bagian perawatan dan penelitian. Lokasinya berada di Persiaran Sultan Sallahuddin Abdul Aziz Shah, tidak jauh dari kantor Perdana Menteri dan buka setiap hari kecuali hari Senin.

Putrajaya Botanical Garden dapat dijelajahi melalui perjalanan trem, sepeda sewaan, dan tur berpemandu. Jalur pendakian yang sangat baik dan fasilitas berkemah adalah daya tarik utama Taman Rimba Alam di dekatnya. Tempat ini adalah rumah bagi ekosistem hutan tropis perkotaan yang berkelanjutan yang dihuni oleh tanaman dari hutan hujan terdekat. Di sini warga dapat belajar ilmu dasar menanam, memelihara, dan memanen tanaman seperti karet, kakao, dan kelapa sawit. Untuk memastikan lingkungan yang patut ditiru tidak rusak, Putrajaya memiliki banyak kebijakan ramah lingkungan. Ada 10 kebun komunal yang warganya dapat menanam buah dan sayuran, fasilitas lebah madu komunitas, dan strategi pengurangan sampah intensif, yang tahun lalu meningkatkan tonase daur ulang kota sebesar 15% dari 2019.

Selain menjadi tempat wisata yang luar biasa, ruang hijau merupakan habitat

yang sangat berharga, menurut ahli biologi konservasi.



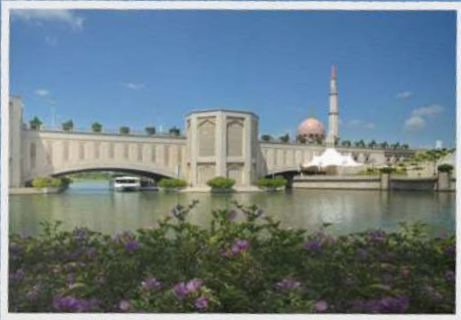
Astaka Morocco, Putrajaya, 2023.

Di dalam kompleks *Putrajaya Botanical Garden* terdapat satu tempat yang seakan-akan berada di Maroko, yaitu Astaka Morocco. Bangunan seluas 1.672 meter persegi ini dibangun atas inisiatif Pemerintah Malaysia dengan bantuan pemerintah dan masyarakat Maroko sebagai simbol ikatan diplomatik kedua negara. Tak heran jika arsitekturnya bergaya Moor yang menjadi ciri khas Maroko dan menyerupai Istana Alhambra di Granada, Spanyol. Bagian dalam Astaka Morocco terbagi menjadi tiga halaman besar, yaitu

Putrajaya beberapa kali memenangkan penghargaan sebagai kota terbersih di kawasan Asia Tenggara, 2023.

halaman depan, *King's Court* dan *Granada Court* yang masing-masing dibatasi pintu gerbang berornamen dengan nama *City Gate*, *Palace Gate*, dan *Splendour Gate*. Hampir semua dinding dan tiang bangunannya dihiasi oleh ayat-ayat Al Quran.

Kantor Perdana Menteri atau yang biasa disebut sebagai Perdana Putra merupakan landmark sekaligus bangunan utama di Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dibangun mulai tahun 1997 hingga 1999, arsitektur bangunan ini merupakan perpaduan Islam, Melayu, dan Moghul modern dengan kubah hijau besar pada bagian puncaknya. Meski tidak diizinkan memasuki area kantor Perdana Menteri, kalian dapat mengambil foto di Dataran Putra (*Putra Square*) yang terletak persis di depannya. Dataran Putra sendiri merupakan alun-alun yang sering digunakan sebagai tempat perayaan, seperti parade kemerdekaan setiap bulan Agustus.



Jembatan Putra, Putrajaya, 2023.

Setiap jembatan tentu memberikan pengalaman, sudut pandang kota, dan arsitektur yang berbeda, misalnya Jembatan Putra yang merupakan jembatan utama menuju kantor Perdana Menteri, Dataran Putra, dan Masjid Putra. Arsitekturnya terinspirasi dari Jembatan Khaju di Isfahan, Iran. Jembatan ini memiliki empat menara segi delapan dengan dek observasi yang menghadap ke

Danau Putrajaya. Selain itu, terdapat Jembatan Seri Wawasan yang terbuat dari bentangan kabel dengan arsitektur dan teknologi modern, Jembatan Seri Gemilang yang menghubungkan *Heritage Square* dengan *Putrajaya International Convention Center* (PICC) dan sering disebut sebagai *ceremonial bridge*, Jembatan Seri Perdana yang memiliki delapan balkon untuk menikmati panorama di sekitar Tasik Putrajaya, dan Jembatan Seri Saujana yang arsitekturnya terinspirasi dari jembatan di *Sydney Harbour*.

Berbeda dengan Dataran Putra yang berada di depan kantor Perdana Menteri dan Masjid Putra, Dataran Putrajaya ini terletak diantara Kompleks Perbadanan Putrajaya, *Palace of Justice*, dan Masjid Besi. Lanskap wilayah ini terinspirasi dari *Champs Elysees* di Paris yang dijuluki sebagai jalanan paling indah di dunia. Salah satu instagramable spot di wilayah ini adalah gerbang besar dan tinggi yang terletak di bagian depan Perbadanan Putrajaya. Perbadanan Putrajaya sendiri merupakan otoritas lokal di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan Malaysia yang mengelola Putrajaya, meliputi perencanaan kota, kesehatan, pengelolaan limbah, dan lain-lain.

Palace of Justice atau Istana Kehakiman yang merupakan lembaga peradilan dan juga museum. Arsitektur bangunannya terinspirasi dari Taj Mahal, Moor, Islam klasik, dengan sedikit sentuhan barat. Di dekat *Palace of Justice* terdapat Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin atau yang sering disebut sebagai Masjid Besi karena mayoritas konstruksi bangunannya terbuat dari besi. Masjid yang selesai dibangun pada tahun 2009 ini dapat



Palace of Justice atau Istana Kehakiman, Putrajaya, 2023.

menampung sekitar 24.000 jamaah, lebih besar daripada Masjid Putra. Posisinya berada tepat di depan *Justice of Palace*.

Pemandangan Putrajaya diakui sangat indah dan asri. Gedung-gedung dibangun dengan teratur, banyak ruang hijau, dan lalu lintas tidak macet. Kota Putrajaya lantas terasa bagaikan sebuah kompleks elit. Di kota ini, infrastruktur berdiri dengan desain elegan dan tertata rapih. Ada banyak taman untuk rekreasi dan observasi, sungainya bersih, burung gagak terlihat terbang bebas, ada banyak sekolah internasional, jalanan lenggang seperti Jakarta ketika Lebaran, dan kotanya sangat ramah pejalan kaki. Kantor pemerintah Putrajaya pun memiliki rerumputan luas, dan jelang tengah malam terlihat masih ada orang piknik di sana. Namun, kota hijau ini sangat hening. Terlalu hening. Pejabat pemerintah Putrajaya menyebut kota ini bisa menampung 350 ribu orang, tetapi hingga penghuni kota belum mencapai 50 persen dari kapasitas tersebut. Kafe-kafe di pinggir jalan hingga *ojek online* cukup sulit ditemui. Pihak pemerintah Putrajaya lantas terus berusaha agar banyak orang yang datang, seperti insentif untuk perumahan dan menggelar acara budaya yang meriah seperti Royal Floria. Sampai sekarang pun, Pemerintah Malaysia terus membangun Putrajaya sebagai kota pemerintahan Malaysia.



MELIHAT POTRET PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA PENYANGGA IKN

Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota negara yang baru, yakni di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi kota yang sangat strategis dalam menyokong pembangunan IKN. Sebagai daerah penyangga IKN, Kota Balikpapan didukung dengan infrastruktur yang baik, transportasi, perekonomian, kependudukan, kondusifitas dan sarana prasarana yang cukup memadai.

Dari sisi ekonomi, kota Balikpapan berada di tengah jaringan transportasi yakni Trans Kalimantan dan Trans Nasional serta memiliki Pelabuhan Laut dan udara terbesar di Kalimantan Timur yaitu Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang. Kondisi ini menyebabkan Kota Balikpapan memiliki posisi yang strategis diantara kabupaten/kota lain yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan dianggap sebagai Pintu Gerbang Kalimantan Timur. Mudahhnya jalur transportasi tersebut menyebabkan pesatnya pembangunan di kota Balikpapan. Tidak mengherankan banyak pendatang turut serta menjadi bagian dalam pembangunan kota Balikpapan.

Besarnya jumlah pendatang di Kota Balikpapan telah membawa keberagaman etnis, sehingga Balikpapan dikenal sebagai kota yang heterogen, baik dari segi adat istiadat maupun agama. Namun demikian hal ini tidak menjadi kendala dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

**Bekerja
sepenuh
hati,
Integritas,
Sinergi dan
Akuntabel**

Kota Balikpapan yang menjadi gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki peranan penting dalam menyokong Ibu Kota Negara (IKN). Balikpapan adalah salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 843,48 KM2, yang terdiri atas 503,30 KM2 daratan dan 340,18 KM2 perairan. Batas wilayah kota ini meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara pada bagian utara, Selat Makassar pada bagian Selatan dan Timur, serta Penajam Paser Utara pada Bagian Barat. Secara umum kota ini memiliki kontur wilayah yang umumnya berbukit (85%) dengan ketinggian antara 0 sampai dengan lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar jenis tanah Balikpapan adalah podsolik merah-kuning, alluvial, dan pasir kuarsa yang mudah tererosi.

Lalu seperti apa penyelenggaraan kearsipan di kota Balikpapan. Tim Majalah ARSIP mencoba menggali informasi seputar penyelenggaraan kearsipan di kota Balikpapan dengan menyambangi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Secara substantif, Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sejalan dengan Visi Wali Kota Balikpapan terpilih periode RPJMD 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman".

Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih menjadi Misi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yakni pertama, mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Ketiga, menyediakan infrastruktur kota yang memadai. Keempat, mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan. Kelima, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Adapun slogan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yakni Dispustakar BISA



(Bekerja sepenuh hati, Integritas, Sinergi dan Akuntabel).

Adapun program di bidang kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan terdiri dari 3 Program dan 8 Kegiatan. Pertama, Program Pengelola Arsip yang terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis, Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dan Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Kedua, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip yang mencakup kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, kegiatan Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana. Selain itu, terdapat kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media serta Pencarian Arsip Statis Kota Balikpapan yang dinyatakan hilang. Ketiga, Program Perizinan Penggunaan Arsip yang meliputi Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.

Sementara itu, guna meningkatkan penyelenggaraan kearsipan di Kota Balikpapan, Dispustakar Kota Balikpapan memiliki inovasi-inovasi kearsipan diantaranya Percepatan Penyelesaian Instrumen Kearsipan diantaranya Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), penerapan Aplikasi Temu BalikArsip yang digunakan internal LKD Kota Balikpapan untuk penyimpanan arsip statis secara digital. Selain itu, Kota Balikpapan juga telah menjadi Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Pada aspek pembinaan kearsipan, Dispustakar Kota Balikpapan telah melakukan pembinaan kearsipan ke seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, baik secara langsung ke perangkat daerah dengan memberikan pemahaman tentang pengelolaan arsip yang sesuai dengan kaidah kearsipan maupun



dilakukan melalui Kegiatan bimtek secara luring dan daring. Pada tahun ini, Dis pustakar Kota Balikpapan akan melakukan kegiatan Sosialisasi Arsip Keluarga kepada beberapa perwakilan Kecamatan dan Kelurahan yang melibatkan Anggota Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Para Ketua RT, Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Posyandu.

Dalam hal pengelolaan arsip statis, Terdapat sebanyak 6.044 Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan sejak tahun 1970 s.d 2012 yang telah ditetapkan sebagai arsip statis. Sebagai upaya dalam mengenalkan sejarah Kota Balikpapan kepada Masyarakat melalui arsip, Dis pustakar Kota Balikpapan memiliki Ruang "City Planning Gallery" yaitu suatu ruangan yang menggambarkan Balikpapan Tempo Dulu dan Gambaran Sekilas Kota Balikpapan. Selain itu, Dis pustakar Kota Balikpapan juga memiliki program Wisata Arsip yakni sebuah program untuk memperkenalkan arsip kepada masyarakat melalui foto dan video, serta pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan. Dis pustakar

Kota Balikpapan juga melakukan diseminasi arsip kota Balikpapan Pengenalan melalui media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Dis pustakar Kota Balikpapan telah memperoleh penghargaan diantaranya meraih Predikat A (Memuaskan) Pengawasan Kearsipan dengan nilai 80,41 di tahun 2019, Panji Keberhasilan Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2017 Bidang Tata Kelola Kearsipan. Dis pustakar Kota Balikpapan pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional RI atas Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) bagi Pemerintah Kota Daerah di Wilayah I. Selain itu, Dis pustakar Kota Balikpapan juga memperoleh Piagam Penghargaan dari Gubernur Kaltim atas Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) bagi Pemerintah Kota Daerah di Provinsi Kaltim.

Dalam penyelenggaraan ke-

arsipan, Dis pustakar Kota Balikpapan mendapatkan beberapa kendala dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi, diantaranya terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan sehingga pengelolaan arsip yang ada di tiap Perangkat Daerah tidak dapat secara maksimal karena merangkap pekerjaan lainnya. Tantangan berikutnya, kurangnya Diklat Fungsional Arsiparis yang diikuti oleh arsiparis. Kendala lain seperti sebagian besar perangkat daerah belum memiliki sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar serta belum tersedianya Record Center sebagai ruang penyimpanan arsip inaktif di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan persyaratan yang diatur pada Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif. Hal berikutnya yang menjadi tantangan krusial yakni, terbatasnya anggaran untuk pengelolaan kearsipan dan pengembangan SDM Kearsipan baik di LKD Kota Balikpapan maupun di Perangkat Daerah.

Dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, Dis pustakar Kota Balikpapan tetap berupaya dan memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk memajukan penyelenggaraan kearsipan di Balikpapan ini dapat berjalan dengan baik sesuai kaidah kearsipan.

"Tentunya harapan saya khususnya di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan kearsipan dapat terlaksana dengan baik sesuai standar dan kaidah kearsipan. Sebagaimana tolak ukur penyelenggaraan kearsipan yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan harapannya Kota Balikpapan bisa mendapatkan nilai Baik di tahun-tahun berikutnya", ungkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Sutadi. ■

PENGENALAN TEKNOLOGI HANDWRITING TEXT RECOGNITION: TRANSKRIBUS

Pada zaman dahulu, manusia menjadikan batu, lembaran daun, lembaran kulit kayu, hingga perkamen sebagai sarana komunikasi. Kita bisa menemukan beberapa coretan, lukisan dan tulisan yang berasal dari masa lalu, yang bahkan beberapa di antaranya masih belum diketahui artinya. Hingga kini, tulisan-tulisan kuno dijaga dan dilestarikan agar bisa dinikmati dengan bantuan paleografi. Paleografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang tulisan kuno. Secara etimologis, kata paleografi berasal dari kata *paleos* (kuno) dan *grafein* (menulis, tulisan). Paleografi berkaitan erat dengan epigrafi, yaitu ilmu yang mempelajari aksara-aksara yang dipakai sebagai sarana penulisan prasasti.

Secara umum paleografi merupakan kajian tentang tulisan-tulisan kuno, termasuk ilmu membaca, menentukan waktu (tanggal), dan menganalisis tulisan-tulisan kuno yang ditulis di atas papyrus, tablet-tablet tanah liat, tembikar, kayu, perkamen (vellum) kertas, dan lontar (daun enau). Di Indonesia sendiri, seperti dikutip dari buku keluaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI yang berjudul *Pelestarian dan Modernisasi Aksara Daerah: Perkembangan Metode dan Teknik Menulis Aksara Jawa (1996/1997)*, penelitian paleografi diawali oleh AB Cohen Stuart pada tahun 1875 melalui buku “*Kawi Oorkonden in Fasimile, Mer Inleiding en Transcriptie*”. Penelitian lainnya secara berturut-turut dilakukan oleh Kern (1917), JG de Casparis (1975) Brandes, Stein Callenfels, Krom, Bosch, Stutterheim, Poerbatjaraka, Pigeaud, Buchari, Ktut Ginarsa, AS Wibowo dan Sukarto K. Atmodjo.

Dalam dunia kearsipan, keahlian paleografi juga diperlukan untuk melacak waktu dan tempat asal tulisan kuno ketika naskah/arsip tersebut dihasilkan. Hal ini dikarenakan salah satu tugas utama paleografi dalam penelusuran adalah menentukan waktu penciptaan naskah/arsip. Penentuan waktu dan lokasi tersebut sangat krusial dalam menentukan peristiwa sejarah yang sedang terjadi. Tulisan tangan biasanya akan menunjukkan sebuah gaya penulisan tertentu, yang dapat dilacak menggunakan pengaruh tertentu yang dapat diidentifikasi waktunya. Dalam bukunya *Filologi Nusantara: Pengantar ke Arah Penelitian Filologi*, Harahap (2021:100) menyatakan bahwa dalam penelusuran paleografi, peneliti atau arsiparis bisa melakukan pengamatan terhadap anatomi tulisan, seperti ukuran, bahan, tinta, panjang, dan jarak baris dalam tulisan.

Selain penentuan waktu dan lokasi, tugas lain paleografi adalah penentuan tujuan penciptaan naskah/arsip yang juga sangat penting. Tujuan arsip tersebut diciptakan biasanya mengikuti fenomena sejarah yang melingkupinya, termasuk tren penggunaan gaya tulisan tertentu, penambahan gambar, dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang muncul dalam arsip juga dapat menentukan perubahan sosial, ekonomi dan material hingga politik. Karena itulah paleografi juga semakin berkembang dengan penggunaan teknologi digital yang dapat membaca arsip kuno dengan lebih mudah. Teknologi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui teks/naskah masa lalu memanfaatkan paleografi dengan sistem digital. Sistem ini memungkinkan peneliti untuk mengenali teks/naskah kuno secara langsung, baik isi, tujuan, dan lokasinya.

Teknologi ini dikenal dengan istilah *Handwriting Text Recognition*

(HTR) atau pengenalan teks tulisan tangan merupakan kemampuan komputer untuk mengenal teks tulisan dan memudahkan kita membaca tulisan dari arsip atau dokumen lama. Penggunaan komputer untuk memproses dan mencari gambar dari dokumen-dokumen bersejarah dengan menggunakan HTR ini sangat membantu peneliti, arsiparis, mahasiswa, institusi serta masyarakat umum untuk mengetahui masa lalu melalui teks tulisan tersebut.

Penelitian yang dilakukan semakin terbantu dengan keberadaan platform menggunakan HTR yang dapat diakses kapan pun, yakni Transkribus. Transkribus merupakan sebuah program *artificial intelligence* (AI) yang bisa mengenali naskah, transkripsi dan mencari dokumen historis, dari mana pun, kapan pun, dan dengan bahasa apa pun. Hal ini dapat mendukung pekerjaan atau penelitian yang terkait dengan dokumen historis.

Tidak hanya sebatas pada penelitian serta bidang kearsipan dan perpustakaan, Transkribus juga dapat digunakan untuk bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga bisnis. Pada sektor bisnis, pemanfaatan AI ini dapat digunakan untuk analisis tata letak dan pemahaman dokumen, serta bekerja dengan dokumen dalam jumlah besar (baik dokumen historis maupun dokumen cetak).

Untuk kearsipan khususnya, Transkribus menawarkan beberapa hal yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna Transkribus, mulai dari digitasi, pengenalan teks berbasis AI, transkripsi, hingga pencarian dokumen bersejarah – dari mana saja, dalam Bahasa apa saja, dan dari abad berapa pun. Penggunaan HTR dalam menganalisis sebuah gambar tulisan sangat berkontribusi dalam kearsipan karena memudahkan semua kalangan untuk membaca, mentranskripsi, dan menggali informasi dari dokumen

historis.

Dalam website readcoop.eu, disebutkan banyak fitur Transkribus yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, di antaranya:

- Pengguna dapat melatih model/pola pengenalan teks tertentu yang bisa mengenali jutaan dokumen yang ditulis, diketik, atau dicetak.
- Pengguna dapat memanfaatkan pengenalan teks tulisan bertenaga AI, analisis tata letak, dan pengenalan struktur.
- Pengguna dapat menggunakan editor transkripsi untuk menyalin dokumen historis secara manual atau bekerja dengan pengenalan bertenaga AI yang menggunakan model AI publik atau model yang dapat pengguna latih sendiri.
- Pengguna dapat mencari dokumen dengan pilihan pencarian lanjutan seperti alat pendeteksi kata kunci.
- Pengguna dapat berkolaborasi melalui dokumen, atur dalam koleksi dan manfaatkan pekerjaan satu sama lain.
- Pengguna dapat membagikan pekerjaannya dengan orang lain melalui portal baca dan pencarian atau pengguna dapat mengubah dokumen menjadi format
- Semua konten di Transkribus, yakni foto yang pengguna unggah, teks yang dikenali, model pengenalan yang terlatih, dan metadata yang sudah diunggah, berada di bawah kendali Uni Eropa dan Transkribus menyatakan mematuhi *General Data Protection Regulation* (GDPR).

Melalui teknologi HTR yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun ini, pengguna dapat memperkaya bahan dengan metadata dan saling berkolaborasi. Dengan kemampuan teknologi yang semakin canggih, akses untuk menjelajah masa lalu melalui teks mudah dilakukan. ■



PENGUATAN REGULASI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DALAM RANGKA PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Pemindahan Kementerian/Lembaga dan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara merupakan momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan cerdas (*smart governance*) dalam pusat pemerintahan sebagai penopang pencapaian visi Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara disebutkan bahwa Salah satu inti dari pemindahan Ibu Kota Negara adalah pemindahan pusat pemerintahan yang meliputi lembaga-lembaga pemegang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Eksaminatif. Sehubungan dengan itu, pemindahan Ibu Kota Negara tidak terlepas dari pemindahan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga). Pemindahan Ibu Kota Negara akan menjadi momentum reformasi birokrasi melalui upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan cerdas.

Penerapan *smart governance* di Ibu Kota Nusantara menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan

perkembangan dinamika strategis berupa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta digitalisasi, masifnya tingkat penetrasi internet, serta munculnya pandemi COVID-19 yang telah mengubah wajah dan cara kerja pemerintahan menjadi berbasis fleksibilitas serta konektivitas digital.

ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk membangun suatu Sistem Kearsipan Nasional. Sistem Kearsipan Nasional ini berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi di semua organisasi kearsipan. Selain itu, Sistem Kearsipan Nasional juga digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kearsipan oleh lembaga kearsipan dan pencipta arsip, yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menggambarkan keterpaduan penyelenggaraan kearsipan melalui Sistem Kearsipan Nasional yang sejalan dengan target penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara, paling tidak ada 3 (tiga) dimensi yang menjadi tugas ANRI yaitu pertama memastikan bahwa pelaksanaan pemindahan ibu kota negara menjadi peristiwa sangat penting yang bernilai sejarah tinggi sehingga segala bentuk arsip yang tercipta oleh komponen lembaga pencipta arsip menjadi prioritas utama untuk diselamatkan dan dikelola/disimpan oleh ANRI, kedua memastikan bahwa perpindahan ibu kota negara tidak mengganggu konektivitas layanan kepada masyarakat, ketiga menjamin agar lembaga pencipta arsip harus mengelola arsip dengan baik agar dapat terjaga kerahasiaannya, mudah diakses, dan tidak hilang atau rusak selama proses pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Dari ketiga dimensi tersebut ANRI merespon dengan penyelenggaraan kearsipan nasional melalui titik tolak pada transformasi digital kearsipan, yaitu penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), alih media arsip/digitasi, dan akses layanan arsip melalui simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Pemenuhan pada kebutuhan konektivitas penyelenggaraan kearsipan pada Ibu Kota Nusantara dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kota cerdas (*smart city*) yang dalam penekanannya berdasarkan pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang disampaikan dalam “Bincang Asik di Titik Nol” dengan tema “IKN dan Indonesia Emas 2045: Transformasi dan Inovasi dalam Konteks Kemerdekaan” yang

diselenggarakan secara luring dan daring di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, hari Kamis (18/8/2022) siang bahwa Kota cerdas akan kita wujudkan dalam bentuk kota yang memiliki kecanggihan teknologi yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ketua Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia Aldi Fauzan Mawardi mengharapkan ke depannya dari sisi perencanaan tata ruang perlu mengutamakan aspek *smart*, *inclusive*, dan *sustainable*. Aspek *smart* tercermin dalam penerapan e-governance, transparansi data pembangunan dan sosialisasi publik, juga pengembangan teknologi phase 4.0 dalam pengadaan fasilitas dan pelayanan publik¹. Pada kebutuhan yang disampaikan tersebut, maka penerapan *e-governance* dan pelayanan publik sangat terkait dengan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh lembaga pencipta yang berada di Ibu Kota Nusantara.

Jika kita kembali pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara bahwa fokus utama perlindungan pada tata kelola cerdas yang merupakan salah satu dimensi kota cerdas merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Salah satu manfaat pendekatan kota cerdas dalam bidang pemerintahan adalah transparansi yaitu meningkatnya partisipasi sosial dan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah. Upaya mewujudkan pemerintahan digital akan diselenggarakan lewat arah kebijakan dan strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana tertuang di Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (SDI) yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Untuk penerapannya yang optimal, dilakukan beberapa upaya antara lain penguatan layanan dan infrastruktur SPBE, yang melalui penetapan arsitektur SPBE nasional, penetapan aplikasi umum SPBE, dan inisiasi layanan publik tematik berbasis SPBE. Hal ini menindaklanjuti berbagai upaya penguatan tata kelola SPBE melalui penetapan berbagai peraturan turunan terkait SPBE dan SDI.

1. Regulasi Kearsipan dalam rangka Perpindahan Ibu Kota Negara

Jika dilihat kembali bahwa pelaksanaan kearsipan di Ibu Kota Negara oleh lembaga pencipta arsip berdasarkan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka pada dasarnya hakekat pengertian arsip sudah bisa mencakup hal tersebut berdasarkan pada frasa berbagai bentuk dan media. Definisi Arsip dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh

¹<https://www.ikn.go.id/en/siapkan-smart-city-kepala-otorita-ikn-ingin-teknologi-dapat-mempermudah-kehidupan-di-ikn-1>

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) sebagai berikut: Setiap penyelenggara sistem kearsipan elektronik, mengoperasikan sistem kearsipan elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan

- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Lebih teknis lagi dalam rangka menindaklanjuti berbagai upaya penguatan tata kelola SPBE melalui penetapan berbagai peraturan turunan terkait SPBE sebagaimana tertuang pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, telah ditandatangani Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dengan penetapan pada Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Selain itu penetapan SRIKANDI merupakan pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang komprehensif dan terpadu, mampu mengidentifikasi keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi dalam suatu Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).

Latar belakang Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis

tersebut menyikapi seiring kemajuan teknologi, pemanfaatan teknologi mulai diterapkan pada Bidang Kearsipan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah seperti penciptaan arsip yang awalnya menggunakan kertas menjadi berbasis elektronik, penggunaan Arsip yang awalnya dilakukan secara luring (*offline*) menjadi secara daring (*online*), penyimpanan arsip yang awalnya disimpan di depo arsip menjadi penyimpanan didalam basis data, pengiriman surat yang awalnya dilakukan secara manual menjadi secara elektronik.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, guna pelaksanaan SRIKANDI agar lebih teknis operasional, ANRI telah menetapkan 3 (tiga) regulasi sebagai pedoman bagi pencipta arsip dan lembaga kearsipan, yang meliputi pertama, Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757. Peraturan ANRI ini mengatur tentang serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, digunakan secara bagi pakai oleh lembaga negara dan/atau pemerintah daerah. Diatur pula bagaimana indikator penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi pada dimensi teknologi, dimensi organisasi, dan

dimensi sumber daya Manusia serta tahapan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis dan integrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kedua, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758. Peraturan ANRI ini mengatur mengenai pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Selain itu peraturan ANRI ini telah mengatur pula pembuatan naskah dinas dapat menggunakan media rekam kertas atau media rekam elektronik. Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis atau aplikasi pengolah kata atau data. Bagi naskah dinas yang dibuat melalui media rekam elektronik, maka menggunakan tanda tangan elektronik. Hal yang penting diatur pula jika terdapat komunikasi kedinasan atau naskah dinas dengan media rekam elektronik yang diterima dari luar lingkungan instansi yang ditujukan kepada pejabat tertentu di lingkungan internal melalui akun media komunikasi dalam jaringan pribadi atau kedinasan pegawai, harus disampaikan kepada unit kearsipan untuk dilakukan registrasi ke dalam aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Penyampaian komunikasi kedinasan atau naskah dinas dengan media rekam elektronik dapat dalam bentuk tangkapan

layar (*capturing*) atau salinan digital (*soft file*).

Ketiga, Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759. Peraturan ANRI ini mengatur tentang proses pengendalian Arsip Elektronik secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi pembuatan, penerimaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, alih media, penyusutan, akuisisi, deskripsi, pengolahan, preservasi, akses dan pemanfaatan. Peraturan ANRI ini memberikan penguatan pada definisi arsip elektronik yaitu arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau arsip hasil alih media. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam mengelola arsip elektronik. Selain itu diatur pula terkait dengan metadata yang merupakan informasi tentang asal, struktur, karakteristik dari seperangkat data dalam penciptaan, pengelolaan dan penggunaan arsip sepanjang waktu secara lintas domain serta agregasi yang merupakan sekumpulan berkas series dari berbagai pencipta yang memiliki kesamaan tema.

Tahapan Pengelolaan Arsip Elektronik dilakukan melalui pembuatan dan penerimaan arsip elektronik, penggunaan arsip elektronik, penyimpanan arsip elektronik, pemeliharaan dan alih media arsip elektronik, penyusutan arsip elektronik,

akuisisi arsip elektronik, deskripsi dan pengolahan arsip elektronik, preservasi digital dan akses dan pemanfaatan arsip elektronik.

Selain itu, terdapat amanat ANRI dalam Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* sebagai *Leading Institution* atau pihak yang ikut mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertugas untuk merumuskan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, memberikan pembinaan dan pelatihan perumusan kebijakan, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) yaitu penguatan pengelolaan arsip digital dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital.

Akhirnya, konsensus nasional terhadap perpindahan ibu kota negara secara kasat mata akan merubah semua pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain momentum bersejarah berkaitan dengan peristiwanya, strategi untuk menciptakan kota pintar (*smart city*) dipengaruhi pula dengan kebijakan kearsipan yang menuju pada tertib arsip, transformasi digital dan memori kolektif bangsa. ■



ARSIPARIS TELADAN

Oleh: Farhah Faridah

Ibu Nurma menghempaskan badannya di kursi ruang pengolahan arsip di depanku. Wajahnya sekilas nampak kesal. Aku agak sungkan bertanya. Aku masih meneruskan pekerjaanku, memverifikasi berkas arsip yang sekilas nampaknya telah rapih pada berkasnya masing-masing. Minggu lalu ada unit pengolah yang menyerahkan arsip inaktifnya pada *record center* tempatku bekerja. Aku arsiparis yang baru saja empat tahun menjadi arsiparis. Aku baru satu tahun menduduki jabatan arsiparis penyelia setelah lulus melalui sertifikasi kenaikan jabatan. Saat ini aku ingin melanjutkan kuliah ke jenjang S1.

Aku baru satu tahun ditempatkan di *record center* ini. Sebelumnya aku menjadi sekretariat pimpinan salah satu unit pengolah di instansikau. Atas pertimbangan aku pegawai yang memiliki jabatan fungsional arsiparis, maka aku ditempatkan di *record center* ini.

“Masih mencocokkan bukti fisik dan daftarnya?” tanya bu Nurma tiba-tiba mengagetkanku.

“Ya, bu. Sedikit lagi. Alhamdulillah cocok fisik dengan daftarnya. Ini tinggal beberapa boks lagi cek dan verifikasi.” Kataku menjawab pertanyaan bu Nurma.

“Sebagian besar itu arsip berketerangan musnah di JRA, ya?” tanya bu Nurma.

“Dari 40 boks yang dipindahkan unit pengolah ke sini, sudah diselesaikan cek dan verifikasi kembali 37 boks. Sisa 3 boks lagi. Sementara hanya 3 boks yang berketerangan permanen di JRA, sisanya jika retensi inaktifnya sudah habis, dapat diproses pemusnahan sesuai kaidah kearsipan yang berlaku.

“Sudah ditandai ya, ini yang musnah dan permanen?” tanya bu Nurma dan memeriksa boks arsip yang sudah kuberikan tanda musnah atau permanen dengan warna kertas mencolok.

“Iya, bu. Nanti kalau sudah semua verifikasi, akan dipisahkan yang nantinya musnah dan diusulkan serah ke LKPT akan ditempatkan di rak yang berbeda.” Kataku menjelaskan rencanaku.

“Wah, kreatif sekali, nih, mbak Prue.” Kata bu Nurma tertawa lepas.

“Terima kasih, bu. Ini saya lakukan untuk memudahkan penyusutan tahap berikutnya.” Kataku sambil meneruskan pekerjaanku.

Ibu Nurma terdiam memandang ke arah berkas-berkas yang sedang kukerjakan. Beberapa kali aku mendengar suara helaan nafasnya. Bu Nurma adalah atasanku. Beliau kepala tata usaha, arsiparis ahli madya, sekaligus pimpinan *record center* yang ditempelkan pada tugas kepala tata usaha.

“Mbak Prue!” lirikan bu Nurma

memanggilku.

“Ya, bu.” Jawabku.

“Mbak Prue tahun depan ikut kegiatan arsiparis berprestasi tingkat instansi, ya! Mbak Prue sebagai perwakilan unit kerja ini. Biar Mbak Prue punya pengalaman dan semakin memahami tugas-tugas arsiparis.”

Aku sejenak menghentikan pekerjaanku. “Baik, bu. Tapi saya mohon bimbingannya.” Jawabku.

Bu Nurma tersenyum. “Mbak Prue pelajari persyaratannya dari mulai sekarang. Saya kirimkan untuk dipelajari dari berkas kegiatan tahun ini. Biasanya tidak jauh berbeda. Nanti saya *share file* persyaratan dan ketentuan mengikuti arsiparis berprestasi tingkat instansi. Mudah-mudahan Mbak Prue memiliki peluang ke tingkat nasional. Bukan untuk sombong, tapi pada ajang ini, Mbak Prue bisa saling *sharing* dengan peserta lainnya. Menambah wawasan kearsipan.” Kata Bu Nurma panjang lebar.

“Baik, bu. Nanti saya pelajari. Tapi, mohon maaf biasanya kan harus ada inovasi. Aduh. Kalau yang itu saya menyerah, bu.” Jawabku tidak yakin bisa ikut ajang arsiparis teladan/ arsiparis berprestasi.

Ibu Nurma tersenyum. “Mbak Prue, sebenarnya sudah menjadi arsiparis berprestasi. Dalam satu tahun banyak sekali kreativitasnya. Mengubah kebiasaan sebelumnya menjadi lebih baik. Kelihatannya sederhana, tapi itu sangat berarti. Arsiparis teladan bukan soal yang paling pandai menjawab soal test, tapi juga tulus memajukan kearsipan tanpa pamrih.”

Aku terdiam, berpikir bagian mana yang menghasilkan kegiatan kreatif selama ini. “Saya tidak mengerti, bu?” tanyaku.

“Tanpa Mbak Prue sadari, Mbak Prue sudah sangat membantu pekerjaan kami menjadi lebih mudah.

Inisiatif mengecek JRA, mana berkas yang nantinya musnah dan serah, memberikan tanda warna berbeda, memisahkan pada rak penyimpanan yang berbeda, tapi tetap ingat asal usul unitnya, tidak bercampur dengan unit lain. Mbak Prue melakukan pekerjaan sesuai kaidah kearsipan. Selain itu, mbak Prue juga membuat denahnya.” Bu Nurma menjelaskan dengan rinci.

Aku terdiam. Bagiku itu hanya untuk memudahkan saja. “Saya mohon maaf, bu, banyak mengajukan sarana kearsipan tambahan jadinya. *Whiteboard*, kertas warna-warni, dan lainnya.” Jawabku sekenanya.

“Tidak apa-apa. Kami usahakan menganggarkan untuk sesuatu yang lebih efisien.”

Aku ragu-ragu mengatakan, tapi akhirnya kuutarakan. “Tahun ini, yang ikut tingkat instansi Ibu Feti ya, bu?”

Ibu Nurma menghela nafas. “Beliau tidak bersedia untuk satu dan lain hal.” Bu Nurma menghela nafas. “Tahun lalu, beliau juga tidak bersedia. Beliau sampaikan kepada saya pada tahun lalu bahwa akan bersedia tahun berikutnya.” Jawab Bu Nurma. “Baik. Mbak Prue selesaikan pekerjaan dan pelajari, ya! Jangan lupa juga rencana melanjutkan kuliah tetap jalan, ya!” Bu Nurma meninggalkanku.

Aku bergegas menyelesaikan pekerjaanku. Ingin kutuntaskan hingga boks keempat puluh. Aku ingin malam ini di rumah menyiapkan semua persyaratanku untuk melanjutkan studi dengan status izin belajar. Studi dan bekerja dengan mengatur waktu sebaik-baiknya. Ada seorang donatur yang membiayai kuliahku nanti. Tadinya aku ingin tugas belajar dan mencari beasiswa. Mumpung masih lajang dan semangat, ingin sekali menambah wawasan dengan kuliah ke S1. Sebelumnya, aku diploma kearsipan.

Sesampainya di rumah, aku segera bersih-bersih. Mandi agar tubuhku bersih dan segar setelah seharian ini memverifikasi berkas dengan daftar arsipnya. Kurebahkan tubuhku pada

kasur. Kunalakan AC. Sejuk. Pikiranku menerawang pada percakapanku dengan Ibu Feti tadi siang, sebelum Bu Nurma berbicara denganku.

“Mbak Prue. Sebaiknya ikut pemilihan arsiparis berprestasi. Kalau menang tingkat instansi, bisa ikut pemilihan arsiparis teladan nasional.” Ibu Feti menghampiriku. Ibu Feti adalah arsiparis pertama sekaligus yang membantu Ibu Nurma pada kesekretariatan. Beruntung sekali di *record center* tempatku bekerja ada 3 orang arsiparis yang semuanya perempuan. Belum tentu unit kerja lain memiliki arsiparis. Masih jarang arsiparis di unit pengolah. Sebarannya belum merata.

“Mohon maaf, Ibu Feti. Bukan kah Bu Feti yang ikut tahun ini?” tanyaku heran meminta aku untuk ikut ajang arsiparis berprestasi tingkat instansi.

“Saya tidak enak kalau ikut. Dulu, arsiparis jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Belum puluhan seperti sekarang.” Bu Feti menghela nafas. “Nah, dulu, kan, pernah ikut, tidak menang. Rasanya kapok kalau ikut ajang arsiparis berprestasi lagi. Harus bikin ini itu, mengumpulkan dokumen untuk persyaratan pendaftaran, bikin video capaian atau prestasi, bikin presentasi, bikin karya ilmiah, dan lain-lain. Menyita waktu. Mending mengerjakan pekerjaan kantor.” Katanya.

“Kalau itu yang menjadi keputusan Ibu Feti, sebaiknya disampaikan kepada Bu Nurma.” Kataku.

“Sudah. Tapi, sepertinya Bu Nurma kecewa. Kecewa karena tahun sebelumnya saya juga tidak bersedia.” Jawabnya.

Aku menebak, mungkin ini yang membuat Bu Nurma nampak kesal saat bertemu denganku di ruang pengolah. Penugasan yang diberikan kepada Ibu Feti tidak sesuai ekspektasinya. Bukan soal menang atau kalah, tetapi bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan kearsipan, dan *sharing* kearsipan dengan peserta lain. Itu

harapan Bu Nurma.

“Bu Nurma itu baik. Kekecewaannya dimungkinkan karena dua tahun sebelumnya Ibu Feti berjanji untuk ikut tahun berikutnya. Saya yakin, Bu Nurma tidak akan memaksa kalau tidak dijanjikan bersedia ikut.” Kataku.

“Kalau kalah lagi bagaimana? Saya tidak punya inovasi apa-apa!”. Ibu Feti sepertinya berpikir. “Mbak Prue punya ide?” tanyanya.

“Hm..barangkali bisa juga capaian dan terobosan yang sudah dilakukan Ibu Feti. Intinya yang sudah dilakukan untuk unit kerja dan berdampak positif.”

“Nah, kalau itu sih bisa. Sepertinya saya sudah membiarkan rasa tak percaya diri hingga sampai 2 kali menolak. Baiklah, saya ikut. Saya akan menemui Bu Nurma setelah beliau selesai rapat.” Katanya mengakhiri percakapan denganku 30 menit sebelum Bu Nurma menemuiku.

Mudah-mudahan Ibu Nurma telah bertemu dengan Ibu Feti setelah siang tadi menemuiku di ruang pengolahan arsip. Ibu Feti awalnya tidak bersedia mengikuti ajang arsiparis berprestasi dikarenakan merasa tidak memiliki inovasi dan takut kalah. Selama aku menjadi tim dengan Ibu Feti, adalah sangat semangat melakukan pendampingan pengolahan arsip unit kerja/unit pengolah yang sebagian besar arsip kacau. Ibu Feti mampu menggerakkan unit pengolah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan. Terbukti melalui adanya pemindahan arsip dari unit pengolah ke *record center*. Prinsip arsip mengalir sesuai kaidah kearsipan berjalan.

Benar kata Bu Nurma. Kita harus mencintai pekerjaan kita, bekerja dengan hati. Jika pekerjaan arsiparis dilakukan dengan hati, akan banyak ide-ide untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Sadar tertib arsip dimulai dari diri kita, dari unit kerja kita. ■



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dengan Kepala ANRI, Imam Gunarto pada 27 Juli 2022 lalu dalam rangka menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan kedua lembaga di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, dan kearsipan. (12/01/23).

KEPALA ANRI HADIRI PENCANANGAN GNSTA DAN PENANDATANGANAN PKS DENGAN KEMENTERIAN ATR/BPN

Jakarta (12/01) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menghadiri rangkaian acara Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (12/01).

Acara yang dilaksanakan secara luring dan daring ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi dan birokrasi, serta peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan secara nasional untuk meningkatkan pelayanan pertanahan Kementerian ATR/BPN.

Dalam sambutannya, Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa sejak penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* tahun lalu, ANRI dengan Kementerian ATR/BPN sudah bersepakat.

“Kami sadar bahwa peran kearsipan lebih banyak untuk *government*. Oleh karena itu, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ialah melalui kesempatan ini,” ungkap Kepala ANRI, Imam Gunarto.

Kepala ANRI menambahkan bahwa GNSTA menjadi salah satu program untuk menertibkan kearsipan. Jika pengelolaan arsip tertib maka bisa mendorong percepatan reformasi birokrasi dan layanan publik.

“Melalui kearsipan, ANRI akan mendukung program Kementerian ATR/BPN,” tutur Kepala ANRI, Imam Gunarto.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam rangka pencanangan GNSTA. Ia menyebutkan bahwa dalam hal kearsipan, Kementerian ATR/BPN sendiri menghasilkan banyak produk dokumen pertanahan dalam rangka melayani masyarakat.

“Dokumen tersebut akan selalu ada selama tanahnya masih ada. Dengan warkah maka kita bisa melihat siapa pemilik tanah yang memiliki hak. Dan hal ini terbukti beberapa bulan lalu saat terdapat kasus, yang pada akhirnya dapat diselesaikan dengan membaca warkah,” ungkap Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto.

“Betapa pentingnya dokumen warkah tanah ini bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya hari ini, yakinlah hal ini akan mereduksi praktik-praktik mafia tanah,” tambahnya.

Pencanangan GNSTA ini diikuti oleh acara berikutnya, yaitu penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN dengan Sekretariat Utama ANRI tentang Pengelolaan Warkah Yuridis dan Buku Tanah, yang turut menghadirkan Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dengan Kepala ANRI, Imam Gunarto pada 27 Juli 2022 lalu dalam rangka menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan kedua lembaga di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, dan kearsipan.

Acara yang berlangsung di Aula Prona Lantai 7 Kementerian ATR/BPN ini melangsungkan serangkaian acara lainnya, yaitu Peresmian (*Launching*) Model Gedung Arsip Kementerian ATR/BPN dan Fasilitas Sarana Prasarana Pusat, serta pelaksanaan webinar “Peluang dan Kendala Penataan Arsip dalam Memberantas Mafia Tanah”. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Desi Pratiwi pun turut hadir menjadi salah satu pembicara dalam webinar tersebut. (rra)



Seminar “Dharma Samudera Pejuang Wanita Negara Poros Maritim Dunia” diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera yang diperingati setiap 15 Desember yang diinisiasi oleh ANRI dan PT Pelabuhan Indonesia. (17/01/23).

MENELISIK ARSIP GENDER MELALUI DISKUSI PANEL “KARTINI DAN PERJUANGAN GENDER DI INDONESIA”

Jakarta (17/01) - Melanjutkan rangkaian acara pada “Seminar Nasional Dharma Samudera Pejuang Wanita, Negara Poros Maritim Dunia” yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, gedung C lantai 2, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menyelenggarakan diskusi panel sesi kedua yang bertema “Kartini dan Perjuangan Gender di Indonesia”. Kegiatan ini dipandu Anggota Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa, Asep Kambali dan menghadirkan narasumber Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof. Erwiza Erman dan Arsiparis Madya ANRI, Nadia F. Dwiandari dengan pembahas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Prof. Endang Susilowati dan Aktivistis Perempuan Marcella Zalianty, Marcella Zalianty.

Prof. Erwiza menceritakan bahwa Kartini sebagai anak ke-5 dari 11 saudara, berasal dari keluarga priyayi dengan budaya feodal Jawa yang sangat ketat. Dengan kelebihan yang dimiliki, Kartini bisa menikmati pendidikan di ELS. Namun sayangnya mimpi untuk pergi ke Belanda tidak terwujud meskipun sudah diperjuangkan oleh temannya, Estella Zeehandelaar. Munculnya kontradiksi antara

budaya feodal dengan budaya modern yang terjadi pada masa itu, membuat hati Kartini bergejolak. Saat itu, konteks politik etis tentang strategi kebijakan pembangunan khususnya di bidang kesetaraan gender sedang berkembang. Hal ini juga diperkuat dengan perbedaan yang sangat besar antara kehidupan penjajah dan masyarakat yang dijajah. Kartini merasa bahwa lingkungan internal dan eksternal sangat jauh berbeda. Ia pun pada akhirnya memilih untuk berjuang dengan tinta, dengan kata-kata. “Kingdom of the words atau kata-kata adalah kekuatan. Kegelisahan Kartini pun diutarakan ke dalam surat-suratnya dengan menuangkan ide-ide tentang kemajuan, pendidikan, kemandirian, dan ketidakadilan khususnya kepada wanita,” tambah Erwiza.

Surat-surat tersebut oleh JH Abendanon dikumpulkan untuk diterbitkan ke dalam sebuah buku pada tahun 1911 yang kini sangat dikenal yakni Habis Gelap Terbitlah Terang (*Door Duisternis tot Licht*).

Sementara itu, Nadia Fauziah Dwiandari menjabarkan cara kerja ANRI dalam mengidentifikasi arsip gender. Mekanisme kerja yang dilakukan berawal dari persiapan yakni memahami konsep dasar konsep gender, kemudian menyusun panduan penelusuran hingga mengeksplorasi arsip

dan metadata. Tahap ini menghasilkan nama-nama organisasi, tokoh, subjek hingga peristiwa yang melingkupi upaya kesetaraan gender. Beberapa nama tokoh yang muncul selain Kartini sendiri ialah Dewi Sartika, Maria Ulfah, dan SK Trimurti. Selanjutnya, pemanfaatan arsip menjadi publikasi kearsipan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan dinominasikan ke dalam *Memory of The World (MoW)*. “Joint nomination untuk MoW untuk arsip gender sendiri ANRI bekerja dengan Universitas Leiden/KITLV.

Marcella Zalianty sebagai pembahas menerangkan bahwa sosok pahlawan perempuan setelah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, maka perjuangannya tidak berhenti di situ saja. “Kita sebagai penerus bangsa wajib mendedikasikan kerja keras untuk meneruskan perjuangan mereka. Ia juga mengulas sosok perempuan pahlawan selain Kartini, yakni Keumalahayati yang berasal dari Aceh. Pada masanya Keumalahayati dan perempuan Aceh lainnya berada pada posisi ketika para suami meninggal maka mereka tidak berdaya secara ekonomi. Maka perasaan emansipasi pun bergolak ketika penjajahan Belanda muncul.”

Pembahas selanjutnya yakni Prof. Endang Susilowati menambahkan alasan Kartini begitu dikenal luas karena adanya glorifikasi terhadap Kartini. Namun dalam sudut pandang Kartini, perempuan yang modern bukan yang harus mampu bersaing dengan laki-laki melainkan perempuan yang bisa menjadi mitra sejajar dengan laki-laki, perempuan yang dihormati dan diterima eksistensinya.

Sebagai informasi, Seminar “Dharma Samudera Pejuang Wanita Negara Poros Maritim Dunia” diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera yang diperingati setiap 15 Desember yang diinisiasi oleh ANRI dan PT Pelabuhan Indonesia. (tr)



Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat Menjelaskan “sebagai poros maritim dunia, rekam jejak pahlawan dan tokoh sejarah juga patut menjadi sebuah pijakan bagi kita untuk menata kembali laut sebagai wilayah strategi NKRI”. (17/01/23).

WAKIL KETUA MPR RI: REKAM JEJAK PAHLAWAN PATUT JADI PIJAKAN MENATA LAUT SEBAGAI WILAYAH STRATEGI NKRI

Jakarta (17/01) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Lestari Moerdijat mengapresiasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah menginisiasi diskusi terbuka untuk menyampaikan kepada publik bagaimana Indonesia memiliki perempuan-perempuan hebat dalam poros maritim dunia. Hal ini disampaikan dalam pembukaan seminar nasional “Dharma Samudera Pejuang Wanita Negara Poros Maritim Dunia” yang diselenggarakan oleh ANRI dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) secara daring dan luring di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, ANRI.

Lestari Moerdijat sebagai pembicara kunci menyampaikan, rekam jejak pahlawan perempuan-perempuan di bidang maritim bisa ditelusuri dan beberapa di antaranya mendapat pengakuan sebagai pahlawan atas perjuangannya, seperti

Indonesia mengangkat Laksamana Keumalahayati dan Martina Tiahahu.

“Ada satu tokoh yang saat ini dalam memori kolektif masyarakat lokal dikenal sebagai pejuang, yaitu Ratu Kalinyamat. Saat ini menunggu waktu yang tepat untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Kekurangan data primer menjadi salah satu alasan. Ini menjadi salah satu tantangan kita. Kelemahan dalam pengarsipan menjadi tantangan bagi kita untuk bisa menyelamatkan banyak hal, seperti catatan penting yang dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan langkah yang telah dilakukan oleh ANRI adalah sebuah langkah mulia yang harus dilanjutkan,” jelas Lestari Moerdijat.

Arsip memiliki peran yang luar biasa. Sejarah mencatat banyak peran signifikan para perempuan yang menggagas berbagai macam

perubahan dalam zamannya. Kegigihan setiap perempuan dalam mempertahankan wilayah laut hingga saat ini membuktikan bahwa hegemoni laut merupakan sektor vital bagi tumbuh kembangnya sebuah kelompok masyarakat.

“Sebagai poros maritim dunia, rekam jejak pahlawan dan tokoh sejarah juga patut menjadi sebuah pijakan bagi kita untuk menata kembali laut sebagai wilayah strategi NKRI,” ujar Lestari Moerdijat.

Seminar ini digelar sebagai sebuah upaya untuk diseminasi program penyelamatan arsip kemaritiman dan arsip gender, serta meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelamatan dan pelestarian arsip kemaritiman dan arsip gender sebagai Memori Kolektif Bangsa dan pemajuan budaya bangsa Indonesia. **(sa)**

Jakarta, 27 Januari 2023

FOTO: DOK. ANRI



Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih (kiri) dan Kepala ANRI, Imam Gunarto (kanan) menunjukkan nota kesepahaman antara ANRI dan Ombudsman RI tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan Nasional dan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Ombudsman RI. (27/01/23).

KEPALA ANRI DAN KETUA OMBUDSMAN RI SEPAKATI NOTA KESEPAHAMAN

Jakarta (27/01) - Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan kearsipan nasional dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Ombudsman RI, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan Nasional dan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Ombudsman RI. Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Gedung C, lantai 2 ANRI.

Pada sambutannya, Imam Gunarto menyampaikan bahwa kolaborasi ANRI dan Ombudsman RI

serta keberadaan kantor perwakilan Ombudsman RI di daerah diharapkan dapat memberikan penguatan kearsipan di instansi pusat dan daerah. Ditambahkan olehnya, arsip memiliki keterkaitan erat dengan proses akuntabilitas dalam birokrasi yang di dalamnya juga turut menjamin penyelenggaraan layanan publik yang cepat, objektif dan transparan. "Kami pun turut mengapresiasi upaya Ombudsman RI untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsipnya yang terlihat dari capaian nilai hasil pengawasan kearsipan yang terus meningkat dari waktu ke waktu," jelas Imam.

Lebih lanjut Mokhammad Najih menyampaikan arsip merupakan bagian penting sejarah perjalanan

bangsa Indonesia. "Jangan sampai kita melupakan sejarah bangsa," jelasnya. Pada kesempatan ini, Mokhammad Najih juga menyampaikan bahwa ada beberapa kasus yang berpotensi terjadinya maladministrasi yang salah satunya diakibatkan karena kurangnya pengelolaan arsip yang baik pada penyelenggara layanan publik. Oleh karenanya instansi pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola kearsipan/dokumennya untuk mencegah maladministrasi tersebut.

Pada kegiatan ini, selain penandatanganan nota kesepahaman, Ketua Ombudsman RI dan jajaran juga turut mengunjungi tempat penyimpanan (depot) arsip statis. **(tk)**



Pelaksanaan Rapat Koordinasi diharapkan dapat disepakati bersama tata cara penataan arsip bagi Kementerian / Lembaga yang baik dan terprogram menuju Ibu Kota Nusantara. (07/02/23).

MENUJU IBU KOTA NUSANTARA, ANRI SELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI PENATAAN ARSIP KEMENTERIAN/LEMBAGA

Jakarta (07/02) - Direktorat Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penataan Arsip Kementerian/ Lembaga (K/L) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Ballroom Magzie, Hotel Grandkemang, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri peserta sebanyak 190 orang dari perwakilan 68 kementerian/lembaga.

Pada sambutannya, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan bahwa ANRI bersama K/L yang akan pindah ke IKN harus menyamakan hati dan pikiran, gerak langkah dan aksi dalam membangun kearsipan, khususnya menuju IKN. Pekerjaan besar dan kolosal ini melibatkan banyak K/L yang akan pindah, sehingga menjadi momen bersejarah yang akan dikenang anak cucu kita. "Proses ini harus dilaksanakan secara kolaboratif, tidak hanya ANRI dengan K/L saja tetapi dengan swasta, perguruan tinggi, dan komunitas bersama-sama bersinergi," terang Imam Gunarto.

Lebih lanjut Imam menambahkan, tugas kita bersama adalah menata dan mendigitalisasi arsip dari 70 K/L yang akan

pindah ke IKN dan menjamin arsip arsip statis, terjaga, vital dapat terselamatkan. Kemudian menjamin arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak bernilai guna kelanjutan dimusnahkan sesuai prosedur. Ini tak lain untuk menjamin arsip, menjaga keberlanjutan administrasi kementerian/lembaga di IKN. "Momen perpindahan menuju IKN ini dapat menjadi momen tertib arsip, transformasi digital dan penyelamatan Memori Kolektif Bangsa (MKB) yang efektif," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Prof. Mohammed Ali Berawi yang hadir sebagai pembicara utama menyampaikan bahwa kita harus mampu untuk menjadi lebih adaptif, produktif, dan kompetitif. Indeks kompetitif manusia Indonesia saat ini mencapai ranking 42 dari semua negara. Salah satu indikator efisiensi pemerintahan, bagaimana *decision making* dilakukan dengan cepat. Maka harapan ke depan adalah sistem Srikandi yang semakin baik. "Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam lima besar negara dengan

kekuatan ekonomi dunia. Maka dari itu, perlu disiapkan Nusantara sebagai Kota Cerdas melalui *e-government*, transportasi dan mobilitas, pembangunan sistem untuk hidup, sumber daya alam dan energi, sumber daya manusia (SDM) dan industri, serta pembangunan lingkungan dan infrastruktur," terangnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Desi Pratiwi menyampaikan bahwa sampai dengan Januari 2023, terdapat 68 K/L, 105 kabupaten dan 93 kota yang menerapkan Srikandi, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2023 semuanya sudah terhubung. ANRI akan lebih fokus pada percepatan penataan dan digitalisasi arsip. Perpindahan ke ibu kota adalah pengalaman baru maka harus benar-benar bisa mengidentifikasi arsip mana saja yang akan digunakan di IKN. Semua arsip tersebut akan dikelola di dalam Srikandi, termasuk salah satunya arsip terjaga. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, dapat disepakati bersama tata cara penataan arsip bagi K/L yang baik dan terprogram menuju IKN.

Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Priyanto Rohmatullah juga mengemukakan bahwa penataan arsip harus dibungkus dalam kerangka Srikandi. Peran ANRI di antaranya melakukan pendataan dan penataan arsip, penerapan Srikandi, penyusutan arsip, peningkatan kompetensi digital SDM Arsiparis, dan advokasi pembinaan kepada K/L yang dipindahkan ke IKN.

Melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat disepakati bersama tata cara penataan arsip bagi K/L yang baik dan terprogram menuju IKN. **(tr)**



FOTO: DOK. ANRI

Diskusi berjalan selama satu jam dan diakhiri dengan foto bersama anggota Delegasi dan PPI Leiden. Diskusi ini pun dilaksanakan sebagai bagian dari agenda kunjungan kerja Delegasi ANRI ke Belanda. (14/03/23).

ANRI DAN UNIVERSITAS LEIDEN SEPAKATI PROGRAM EKSEKUTIF DAN PENOMINASIAN ARSIP KARTINI SERTA PERJUANGAN KESETARAAN GENDER INDONESIA SEBAGAI MOW

Leiden (14/03) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Universitas Leiden Belanda menyepakati program eksekutif yang ditandai dengan penandatanganan program eksekutif oleh Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani dan Direktur Perpustakaan Universitas Leiden, Kurt de Belder. Hadir dalam penandatanganan ini Kepala ANRI, Imam Gunarto, Duta Arsip sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rieke Diah Pitaloka dan Penasihat Ahli ANRI bidang arsip kemaritiman, Connie Rahakundini Bakrie serta anggota delegasi ANRI lainnya.

Pada sambutannya, Imam menyampaikan bahwa kerja sama ini berkontribusi dalam kegiatan preservasi, akses koleksi dan arsip yang dimiliki kedua lembaga serta peningkatan kapasitas sumber daya

manusia khususnya bagi Arsiparis di Indonesia. Dalam kesempatan ini, delegasi ANRI pun melaksanakan pembahasan tentang penominasian arsip Kartini dan perjuangan kesetaraan gender di Indonesia.

Menurut Rieke, Kartini sebagai tokoh perempuan Indonesia telah

menginspirasi kaum wanita di Indonesia dan bahkan dunia sejak dahulu hingga saat ini. Penominasian bersama arsip Kartini ini dilakukan tidak hanya dengan Universitas Leiden Belanda, tetapi juga dengan Arsip Nasional Belanda yang juga memiliki arsip tersebut. **(agp/ts)**





FOTO: DOK. ANRI

Kerja sama ANRI dan NAN diproyeksikan akan melakukan pertukaran kepakaran dalam rangka penggunaan protokol International Image Interoperability Framework (IIIF) untuk menyajikan arsip dan metadata kedua lembaga secara daring. (14/03/23).

ANRI DAN NAN PERKUAT KERJA SAMA KEARSIPAN

Amsterdam (14/03) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Direktur National Archives of the Netherlands (NAN), Afelonne Doek menandatangani Program Eksekutif kerja sama kearsipan Indonesia – Belanda periode 2023 – 2026. Program Eksekutif ini merupakan turunan dari Memorandum Saling Pengertian kedua lembaga yang ditandatangani sebelumnya pada Oktober 2022 di Jakarta. Pada acara penandatanganan ini dihadiri pula oleh Duta Arsip sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rieke Diah Pitaloka dan Penasihat

Ahli ANRI bidang arsip kemaritiman, Connie Rahakundini Bakrie serta anggota delegasi ANRI.

Kepala ANRI menyampaikan bahwa melalui kerja sama ini kedua lembaga akan meningkatkan khazanah arsip keduanya melalui pertukaran hasil alih media arsip periode VOC dan Kolonial Hindia – Belanda. ANRI dan NAN juga akan melakukan penominasian bersama arsip warisan dokumenter yang dimiliki dalam daftar Memori Dunia UNESCO serta mengadakan pameran arsip tentang sejarah bersama, warisan, dan hubungan budaya yang diadakan di

kedua negara.

Di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ANRI akan mengikuti lokakarya dan pelatihan yang diselenggarakan oleh NAN dalam bentuk lokakarya dan pelatihan musim panas atau musim dingin di Belanda. Melalui kerja sama ini, keduanya juga diproyeksikan akan melakukan pertukaran kepakaran dalam rangka penggunaan protokol International Image Interoperability Framework (IIIF) untuk menyajikan arsip dan metadata kedua lembaga secara daring. **(agp/ts)**



ANRI bekerja sama dengan UNESCO Jakarta menyelenggarakan Talkshow dan Lomba Desain Poster “Meningkatkan Kesadaran Warisan Dokumenter bagi Aktivis dan Pakar Kebudayaan” di Museum KAA, Bandung. (20/03/23).

HUT KE-30 MOW, ANRI DAN UNESCO JAKARTA SELENGGARAKAN TALKSHOW DAN LOMBA DESAIN POSTER PENINGKATAN KESADARAN WARISAN BUDAYA DOKUMENTER

Bandung (20/03) - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 *Memory of the World* (MoW) dan HUT ke-68 Konferensi Asia Afrika (KAA), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku Komite Nasional MoW bekerja sama dengan UNESCO Jakarta menyelenggarakan *Talkshow* dan Lomba Desain Poster “Meningkatkan Kesadaran Warisan Dokumenter bagi Aktivis dan Pakar Kebudayaan” di Museum KAA, Bandung. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Museum KAA juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Turut hadir Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Itje Chodidjah dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat, Hening Widiatmoko mewakili Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil.

Saat membuka acara, Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa acara ini merupakan kerja sama yang baik antara UNESCO Jakarta dengan ANRI selaku Komite Nasional MoW. Tak hanya itu turut terlibat bekerja sama pula Museum KAA dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Imam Gunarto juga memaparkan rencana penominasian

warisan dokumenter Indonesia menjadi MoW pada 2023, yakni penominasian MoW dan *Memory of the World Committee for Asia and the Pacific* (MoWCAP).

Penominasian MoW tersebut di antaranya Arsip Kartini dan Perjuangan Gender Indonesia (Indonesia dan Belanda), Arsip Jalur Rempah (Indonesia, Belanda, Portugal, Malaysia, Tiongkok), Syair-syair Hamzah Fansuri (Indonesia, Belanda), Naskah Sanghyanh Siksa Kandang Karesian, Tambo Tuanku Imam Bonjol, Arsip dan Naskah Syekh Yusuf Makassar (Indonesia, Sri Lanka, Afrika Selatan). Adapun penominasian MoWCAP yakni Arsip Pembentukan ASEAN (Negara ASEAN, SARBICA, dan Sekretariat ASEAN).

Sebelum sesi *talkshow*, Pakar Desain Grafis Institut Teknologi Bandung, A.M. Mahdar mengumumkan pemenang lomba desain poster “Program Memori Dunia UNESCO dari Indonesia”. Juara I, II, III lomba desain poster secara berturut-turut ialah Mukhammad Fahmi Idris dari Kampus 2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Kuningan Kota Cirebon dengan karya “Maskapai Dagang Hindia Timur”, Muhamad Akhmal Fryandi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan karya “Aku Cinta Indonesia MERDEKA”, dan Pripti Nur Kholifah dari Universitas Al-Ghafari dengan karya “Making History Cool Again”.

Adapun narasumber yang mengisi sesi *talkshow*, di antaranya Programme Specialist UNESCO Jakarta, Ana Lomtadze yang menyampaikan materi Berkenalan dengan Memori Dunia; Ketua Dewan Pakar Komite Nasional MoW Indonesia, Muchlis PaEni dengan materi Khazanah MoW dan Manfaatnya bagi Ilmu Pengetahuan dan Kemanusiaan; Kepala Museum KAA, Dahlia Kusuma Dewi yang dengan materi tentang Akses Universal pada Warisan Dokumenter: Studi Kasus Arsip Konferensi KAA; serta Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, Kandar yang menyampaikan materi tentang Pelestarian Warisan Dokumenter: Tantangan dan Peluang. Sebagai informasi, acara dapat kembali disaksikan pada kanal Youtube Arsip Nasional RI melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=F9uBy_kVnx0. (sa)



Sebagai Lembaga Negara, Kemenperin telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Tercatat Kemenperin telah melaksanakan penyerahan arsip statis sebanyak 8 kali pada 2004, 2007, 2017, 2019, 2020, 2021, dan 2022. (21/03/23).

KEMENPERIN SERAHKAN ARSIP STATIS, ARSIP PENANGANAN COVID-19, DAN SALINAN AUTENTIK ARSIP TERJAGA

Jakarta (21/03) - Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) menyerahkan arsip statis, arsip penanganan Covid-19, dan salinan autentik arsip terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penyerahan arsip dilaksanakan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dan diterima langsung oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto di Ruang Garuda, Kemenperin, Jakarta Selatan.

Pada sambutannya, Imam Gunarto menyampaikan terima kasih atas keseriusan dan komitmen Kemenperin terhadap dunia kearsipan. Arsip yang diserahkan merupakan memori yang sangat penting bagi generasi mendatang karena menggambarkan sejarah bangsa sekaligus merupakan arsip negara yang berkaitan erat dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup berbangsa

dan bernegara. Hal tersebut diamini Dody Widodo, melalui sambutannya, Dody menyampaikan tanpa arsip bangsa ini tidak bisa maju. Arsip bernilai guna bagi bangsa dan negara, jika arsip tidak terjaga dikhawatirkan akar permasalahan kita sebagai bangsa tidak jelas diketahui. Dalam menjaga hal tersebut, Dody berjanji untuk terus berupaya meningkatkan kinerja kearsipan di lingkungan Kemenperin salah satunya melalui kegiatan penyerahan arsip statis.

Sebagai Lembaga Negara, Kemenperin telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Tercatat Kemenperin telah melaksanakan penyerahan arsip statis sebanyak 8 kali pada 2004, 2007, 2017, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Sedangkan penyerahan arsip statis

penanganan Covid-19 dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga masing-masing merupakan penyerahan arsip yang pertama kalinya bagi Kemenperin.

Pada penyerahan kali ini, arsip yang diserahkan berupa 55 sampul arsip statis kurun waktu 2013-2015, 17 lembar dan 8 sampul arsip tekstual dan 14 arsip foto digital (dalam 1 USB/flashdisk) arsip statis penanganan Covid-19 kurun waktu tahun 2020-2021 dan 5 nomor arsip (3 berkas, 13 lembar) salinan autentik arsip terjaga kurun waktu tahun 2018, 2019, dan 2021.

Melalui kegiatan penyerahan arsip statis tersebut, ANRI optimis bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kemenperin akan semakin tertib, semakin baik dan semakin maju karena kesadaran seluruh pejabat dan pegawai Kemenperin terhadap arti penting arsip semakin meningkat. **(tk/pi/ra)**



Program MKB adalah program registrasi arsip sebagai warisan dokumenter yang diampu oleh ANRI sebagai bagian dari program registrasi warisan dokumenter (Memory of the World) UNESCO dengan kriteria spesifik yang harus dipenuhi oleh pengusul agar dapat dimasukkan ke dalam register MKB. (06/04/23).

PENOMINASIAN ARSIP SEBAGAI MKB: 12 ARSIP DIUSULKAN SEBAGAI WARISAN DOKUMENTER

Jakarta (06/04) - Sebagai tindak lanjut hasil Sidang Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa (MKB) pada 30 Maret 2023, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Presentasi Nominasi dalam Program Penominasian Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa Tahun 2023 di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta (06/04). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto dan Ketua Komite MKB, Kandar. Turut hadir pula sebagai undangan, Ketua Dewan Pakar Komite MKB Mukhlis PaEni beserta anggota, di antaranya M. Taufik, Prof. Singgih Tri Sulistiyono, Adrianus LG Waworuntu, Sri Sumekar dan Asep Kambali.

Dalam arahannya, Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan

bahwa ANRI selaku instansi yang bertanggung jawab dalam program registrasi arsip sebagai MKB telah melaksanakan sosialisasi peraturan terkait dengan hal tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat luas tidak hanya di lingkungan para pemangku kepentingan, tetapi juga organisasi masyarakat di seluruh Indonesia.

Program MKB adalah program registrasi arsip sebagai warisan dokumenter yang diampu oleh ANRI sebagai bagian dari program registrasi warisan dokumenter (*Memory of the World*) UNESCO dengan kriteria spesifik yang harus dipenuhi oleh pengusul agar dapat dimasukkan ke dalam register MKB.

“Nah, kriteria ini mencakup apa

saja? Ada signifikansi budaya, ada sejarah, sosial dari warisan dokumenter, ada juga keaslian, integritas, dan kelangkaannya. Program ini juga memberikan panduan dan dukungan kepada lembaga atau individu untuk melestarikan dan menyediakan akses ke warisan dokumenter mereka,” terang Imam Gunarto.

Adapun beberapa arsip yang dinominasikan sebagai arsip MKB, di antaranya:

1. Nasionalisasi Pabrik Semen Pertama di Indonesia 1907-1972;
2. Arsip Studiefonds Mangkunegaran;
3. Arsip Kesenian Tari Khas Mangkunegaran;
4. Arsip-arsip Pembangunan Infrastruktur pada Masa Kolonial (1874-1929);
5. Arsip PT Garam Periode 1924-1961;
6. Arsip Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Periode 1893-1982;
7. Arsip Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia 1946-1949;
8. Arsip Pembangunan Patung Dewi Saraswati di Washington DC;
9. Manusia Laut Suku Sama Bajau (Dalam Cerita Manusia Perahu Terakhir);
10. Arsip Radio Rimba Raya;
11. Arsip Belitong Unesco Global Geopark;
12. Percikan Semangat Juang Arek Suroboyo di Hotel Majapahit.

Kegiatan ini diselenggarakan secara *hybrid* dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada 12 nominator register MKB untuk memberikan gambaran secara visual dan faktual, terkait dengan kandungan informasi dan signifikansi sejarah yang terkandung dalam khazanah arsip yang dinominasikan kepada para anggota Dewan Pakar MKB. **(tr)**



Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas (tengah) didampingi Kepala ANRI, Imam Gunarto (kiri) dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani (kanan) saat membuka Rakornas Kearsipan Tahun 2023. (22/04/23).

MENTERI PANRB MEMBUKA RAKORNAS KEARSIPAN TAHUN 2023

Banyuwangi (22/05) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas hadir membuka dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan Tahun 2023 dalam rangka Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023 di Blambangan Ballroom, Hotel El-Royal, Banyuwangi, Jawa Timur (22/5).

Dalam arahannya pada Rakornas Kearsipan Tahun 2023, Abdullah Azwar Anas menyampaikan dan menekankan arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi. "Kita harus bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak," ujar Menteri PANRB. "Kemudian, yang kedua, birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan yang ketiga birokrasi ini harus lincah dan cepat," tambahnya.

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, menurut Abdullah Azwar Anas perlu diadakannya strategi dan cara untuk melipat gandakan capaian, tidak mungkin tanpa digitalisasi dan harus menentukan skala prioritas.

"Birokrasi ini engine," ujar Menteri PANRB. "Maka, kalau pelayanan negara ingin bagus, birokrasinya mesti kita perbaiki bersama-sama dan itu adalah tugas kita bersama."

Arahan yang diberikan pada acara Rakornas Kearsipan Tahun 2023 ini menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo terkait Program Prioritas Kementerian PANRB, antara lain pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, penerapan reformasi birokrasi tematik, transformasi profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis digital, akselerasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP digital di seluruh Indonesia, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata Kelola, dan ASN menuju IKN Nusantara dan DOB Papua, serta transformasi sistem Pendidikan ASN mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik.

"Terkait dengan kearsipan, kami yakin dengan langkah yang disampaikan oleh

teman-teman ANRI, Kementerian/Lembaga sekarang melangkah tidak lagi dengan manual, tapi dengan digital. Sehingga Memori Kolektif Bangsa tentu akan terawat dengan baik dan saya yakin ke depan anak-anak, cucu kita akan bisa mendapatkan ini dengan baik di masa mendatang," jelas Menteri PANRB.

Abdullah Azwar Anas turut mengapresiasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Ia mengungkapkan bahwa migrasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar segera dijemput dan pada tahun 2024 semua harus sudah diintegrasikan.

Dalam akhir arahannya, Menteri PANRB memberikan ucapan selamat kepada ANRI dan Banyuwangi atas terselenggaranya acara Rakornas Kearsipan Tahun 2023 dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023, serta melakukan peresmian pembukaan secara simbolis acara Rakornas Kearsipan Tahun 2023 didampingi Kepala ANRI, Imam Gunarto serta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. (rra)



Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas (kiri) didampingi Kepala ANRI, Imam Gunarto (kanan) memberikan penghargaan sebagai Tokoh Kepemimpinan Kearsipan dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (tengah). (22/04/23).

ANRI BERIKAN PENGHARGAAN TOKOH KEPEMIMPINAN KEARSIPAN KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR

Banyuwangi (22/05) - Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kearsipan ke-52 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima seluruh peserta Anugerah Kearsipan 2023 untuk hadir pada acara welcoming dinner di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Senin (22/5). Pada acara ini, ANRI memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai Tokoh Kepemimpinan Kearsipan dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa.

Dalam sambutannya, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto mengucapkan terima kasih atas undangan dan telah bekerja sama dengan ANRI untuk

penyelenggaraan acara dalam rangka peringatan Hari Kearsipan ke-52. Pada acara ini turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, serta Pakar Militer dan Pertahanan, Connie R. Bakrie.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih atas keseksamaan dalam meningkatkan kearsipan dan dapat menikmati indahnya Jawa Timur. Semangat positif kearsipan juga disampaikan oleh Pakar Militer dan Pertahanan, Connie R. Bakrie. Menurutnya, kekuatan arsip itu penting dan arsip bisa menjadi senjata, serta mengajak untuk terus semangat dalam memelihara arsip.

“Berbagai kalangan harus banyak untuk memiliki perhatian terhadap

arsip. Arsip dapat menjadi senjata. Apalagi kawasan perbatasan mulai sedang tidak baik-baik saja, tapi arsip-lah yang dapat membunyikan sejarah bahwa papua bagian dari NKRI, karena itu adalah salah satu senjata kita,” jelas Connie R. Bakrie.

Peringatan Hari Kearsipan ke-52 diselenggarakan dengan mengusung tema “Gerakan Kearsipan: Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul”. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kembali seluruh entitas kearsipan untuk berkolaborasi agar penyelenggaraan kearsipan secara nasional semakin berkualitas, sehingga mendorong pemanfaatan bidang kearsipan bagi masyarakat Indonesia sebagai memori kolektif dan informasi jati diri bangsa. **(sa)**



Imam Gunarto juga menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan Hari Kearsipan ke-52 yakni dapat mengambil marwah perjuangan kearsipan yang dilakukan oleh para pendahulu dan kemudian meneladaninya. (22/04/23).

KEPALA ANRI: PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-52 MOMENTUM DORONG REFORMASI BIROKRASI DAN PEMAJUAN BUDAYA

Banyuwangi (22/05) - Puncak peringatan Hari Kearsipan ke-52 pada tahun 2023 dilaksanakan di Hotel El Royale, Banyuwangi dengan mengangkat tema “Gerakan Kearsipan Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa dan Peradaban Unggul”. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dalam laporan pembukaan puncak acara tersebut menyampaikan bahwa tema tersebut sejalan dengan program nasional, di mana program kearsipan memiliki dua impact, yaitu mendorong percepatan reformasi birokrasi yang maju, dan mendorong pemajuan kebudayaan melalui terbentuknya memori kolektif bangsa dan peradaban yang unggul.

“Bangsa kita terkenal sebagai bangsa pelupa, satu-satunya jalan untuk mengatasinya adalah

dengan membangun kearsipan sebagai pusat memori kolektif bangsa. Banyak masyarakat yang tercerabut dari memori desa dan daerahnya, tercerabut dari memori kebangsaannya. Banyak anak-anak bangsa yang hidup di Indonesia, tetapi memorinya berbeda dan bukan Indonesia. Jika ini kita biarkan, maka bangsa kita akan mengalami kekeroposan dari dalam. Saya sangat yakin bahwa gerakan kearsipan untuk mengembalikan dan menjaga memori kolektif bangsa adalah peperangan sesungguhnya, kita hari ini,” papar Imam Gunarto.

Pada kesempatan yang sama, Imam Gunarto juga menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan Hari Kearsipan ke-52 yakni dapat mengambil marwah perjuangan kearsipan yang dilakukan oleh

para pendahulu dan kemudian meneladaninya. Komunitas kearsipan diharapkan dapat meneguhkan dan memperkokoh kembali niat untuk menyelenggarakan kearsipan yang lebih baik dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur terpilih sebagai hasil kesepakatan para Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi se-Indonesia pada peringatan Hari Kearsipan ke-51 di Pekanbaru, Riau. Peringatan Hari Kearsipan ke-52 tahun 2023 ini juga dilaksanakan tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan Bidang Kearsipan di tingkat kementerian/lembaga/daerah/BUMN/PTN untuk melaksanakan tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa. (tk)



Ipuk Fiestiandani menyampaikan pentingnya tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien dapat menjadikan data-data di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terintegrasi. (22/04/23).

BUPATI BANYUWANGI: TERIMA KASIH ATAS PENYELENGGARAAN PUNCAK PERAYAAN HARI KEARSIPAN KE-52 DI KABUPATEN BANYUWANGI

Banyuwangi (22/05) - Peringatan Hari Kearsipan ke-52 tahun 2023 diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Kearsipan ke-52 berdasarkan hasil Executive Board Meeting peringatan Hari Kearsipan ke-51 di Provinsi Riau.

Dalam peringatan Hari Kearsipan ke-52, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengucapkan terima kasih kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai tuan rumah penyelenggaraan puncak perayaan Hari Kearsipan ke-52.

“Kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Banyuwangi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ANRI yang telah memilih Kabupaten

Banyuwangi untuk penyelenggaraan Hari Kearsipan ke-52. Kedatangan Bapak/Ibu menjadi salah satu kontribusi dalam pemulihan ekonomi di Banyuwangi,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Ipuk Fiestiandani menyampaikan pentingnya tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien dapat menjadikan data-data di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terintegrasi. Tata kelola arsip ini juga akan berdampak positif pada unit kerja, termasuk hasil pengawasan kearsipan. Sebagai informasi, berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan nilai pengawasan kearsipan.

“Peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sebelumnya pada

tahun 2021 mendapatkan nilai 37,5 dan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 menjadi 68,8. Ini berkat komitmen seluruh SKPD yang meningkat,” jelas Ipuk Fiestiandani. Banyuwangi terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola kearsipan. Beberapa di antaranya adalah menerapkan Aplikasi SRIKANDI serta pendampingan tenaga kearsipan di unit kerja masing-masing.

Dalam acara puncak peringatan Hari Kearsipan ke-52 ini, turut hadir Kepala ANRI, Imam Gunarto, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Pimpinan Unit Kearsipan pada Kementerian/Lembaga, Pimpinan Lembaga Kearsipan Provinsi, Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/ Kota, Perwakilan Pimpinan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri, serta Perwakilan Pimpinan Unit Kearsipan BUMN. **(sa)**



FOTO: DOK. ANRI

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro (kiri) secara simbolis menyerahkan arsip statis Komnas HAM kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto (kanan) di kantor Komnas HAM. (07/06/23).

HUT KE-30, KOMNAS HAM SERAHKAN ARSIP STATISNYA KE ANRI

Jakarta (07/06) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bertepatan dengan peringatan 30 tahun Komnas HAM. Pada kesempatan ini, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menyerahkan arsip statis tersebut kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto di kantor Komnas HAM. Serah terima arsip statis Komnas HAM dilaksanakan dalam rangkaian acara peringatan 30 Tahun Komnas HAM. Setelah kegiatan serah terima arsip statis, dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ANRI dengan Komnas HAM dan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Komnas HAM.

“Terima kasih dan penghargaan yang tinggi, karena ada tiga momen kearsipan dilaksanakan dalam perayaan ulang Komnas HAM yang ke 30, yaitu MoU/PKS, Penyerahan arsip statis, dan GNSTA. Tiga kegiatan yang menunjukkan proses transformasi Komnas HAM berjalan sangat hebat selama 30 tahun”, ujar Imam Gunarto.

Imam menambahkan bahwa penyerahan arsip statis Komnas HAM ini merupakan ketiga kalinya, sebelumnya pada tahun 2022 telah dua kali menyerahkan arsip statis ke ANRI. Arsip yang diserahkan tersebut merupakan bagian dari memori kolektif bangsa, yang nantinya akan menjadi bahan pembelajaran masyarakat.

Imam mengungkapkan bahwa pencanangan GNSTA sebagai bentuk komitmen bahwa perjuangan

pemajuan dan penegakan HAM harus terdokumentasi dalam arsip yang baik, dengan tata Kelola yang standar, sehingga kualitas arsip yang merekam aktivitas pemajuan dan penegakan HAM bersifat handal, baik untuk kepentingan administrasi, akuntabilitas, maupun membangun memori kolektif bangsa di bidang HAM.

Sementara itu, Atnike Nova Sigiro mengungkapkan rasa beryukurnya pada peringatan 30 Tahun Komnas HAM. “Komnas HAM pada usianya yang ke-30 adalah bukti bahwa Lembaga ini telah bertahan menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik di Indonesia maupun di tingkat global,” ungkapnya dalam sambutan. **(is)**



Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan saat mengunjungi ruang Restorasi Arsip ANRI. (12/06/23).

MENKOMARVES, LUHUT BINSAR PANDJAITAN: K/L/D HARUS PARTISIPASI DAN DUKUNG ANRI SELAMATKAN ARSIP KEMARITIMAN

Jakarta (12/06) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa betapa penting melakukan pengarsipan. “Dari hasil kunjungan tadi di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), saya melihat banyak data dari zaman Belanda dibanding zaman Republik. Arsip pada abad ke-16 masih dipelihara, tinggal kita bagaimana turut menambahnya dari kemaritiman,” papar Luhut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Arsip Kemaritiman yang diselenggarakan ANRI secara daring dan luring di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Gedung C lantai 2 ANRI.

Ditambahkan olehnya, di antara negara-negara G20, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup baik dari

sisi ekonominya. Banyak juga keberhasilan lain yang dicapai Indonesia saat ini, seperti hilirisasi, penanganan Covid-19 yang sudah seharusnya menjadi kebanggaan bersama dan direkam dalam arsip kita. “Arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, memori kolektif bangsa yang harus dikelola dan diselamatkan demi kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk juga perjanjian batas maritim, batas-batas negara perlu didokumentasikan dengan baik, harus dipegang betul,” tegas Luhut.

Menutup sambutannya, Luhut kembali menegaskan bahwa arsip adalah *something* yang harus dipelihara. Selain yang sudah terjadi pada masa lalu, kebijakan kemaritiman pada era Presiden Joko Widodo juga penting dilaksanakan.

“Mari dukung dan berpartisipasi aktif bagi kementerian/lembaga dan daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung ANRI menyelamatkan arsip kemaritiman. Ke depan, ANRI juga diharapkan dapat memberikan bahan informasi kearsipan sejarah kemaritiman bangsa Indonesia,” ucapnya.

Sebagai informasi, sebelum membuka Rakor Penyelamatan Arsip Kemaritiman, Luhut beserta jajaran terlebih dahulu melaksanakan kunjungan ke Depot Arsip Konvensional dan Arsip Proklamasi, Laboratorium Kearsipan, dan Ruang Restorasi Arsip ANRI. Luhut juga memberikan apresiasi terhadap yang telah dilaksanakan ANRI dalam merawat arsip bangsa. (tk)



FOTO: DOK. ANRI

Rapat Koordinasi Temu Jaringan SIKN dan JIKN dihadiri sekitar 217 peserta yang merupakan anggota Simpul Jaringan dari seluruh Indonesia, berasal dari berbagai lembaga kearsipan provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga, Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN. (21/06/23).

SIMPUL JARINGAN SE-INDONESIA IKUTI RAKOR TEMU JARINGAN NASIONAL TAHUN 2023

Yogyakarta (21/06) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan koordinasi nasional dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Temu Jaringan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2023 dengan tema “Akses Arsip Warisan Budaya Nusantara dalam Memperkokoh Jati Diri Bangsa melalui SIKN dan JIKN” sebagai bentuk pelaksanaan tugas sebagai Pusat Jaringan Nasional, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), pada 21 s.d. 23 Juni 2023.

Rapat Koordinasi Temu Jaringan SIKN dan JIKN yang diselenggarakan di Hotel Sahid Raya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta ini dihadiri sekitar 217 peserta yang merupakan anggota Simpul Jaringan dari seluruh Indonesia,

berasal dari berbagai lembaga kearsipan provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga, Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN.

“Tujuan diadakan Rapat Koordinasi Temu Jaringan 2023, sebagai forum koordinasi nasional antara ANRI sebagai pusat jaringan nasional dengan simpul jaringan. Sampai saat ini telah diberikan persetujuan oleh Arsip Nasional RI sebanyak 407 simpul,” terang Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman dalam mengawali laporan kegiatannya.

Acara yang diselenggarakan secara luring ini selanjutnya dibuka Kepala ANRI, Imam Gunarto. Pada sambutannya, Imam menyampaikan bahwa arsip memiliki fungsi sebagai memori kolektif identitas dan jati diri bangsa. “Undang-undang mengamanatkan agar dikelola

oleh negara, diselamatkan oleh negara. Arsip itu dikelola oleh negara melalui sebuah jaringan melalui SIKN dan JIKN,” papar Imam Gunarto.

Pada kesempatan yang sama hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sekretaris Daerah Provinsi, Beny Suharsono. Menurutnya, acara Rapat Temu Jaringan Nasional ini, menjadi sangat penting sebagai forum untuk meningkatkan kerja sama, perukaran pengetahuan, dan berdiskusi strategi terbaik dalam pengelolaan arsip yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Ketua Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa, Mukhlis PaEni turut hadir menyampaikan sambutan kuncinya terkait kearsipan dimulai dari zaman kerajaan, surat-surat formal antara kerajaan lokal Nusantara merupakan cikal bakal arsip kerajaan Nusantara.

Sebagai penghubung rangkaian acara pada hari pertama (29/6), Penasihat Ahli ANRI Bidang Pertahanan dan Kemaritiman, Connie Rahakundini Bakrie juga menyampaikan bagaimana peranan arsip dalam pertahanan keamanan negara.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Temu Jaringan ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi secara nasional antara pusat jaringan nasional dengan simpul jaringan. Sebagaimana diamanatkan di Undang-undang 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk pembuatan layanan informasi kearsipan kepada masyarakat.

Dalam rangkaian acara rakor pada hari pertama ini, dirilis aplikasi SIKN JIKN versi terbaru oleh Kepala ANRI dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi DIY. **(za)**

Mari Dukung Kami Wujudkan

”
**PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK
YANG
BERSIH MELAYANI
DALAM**

Direktorat Layanan & Pemanfaatan | Pusdiklat Kearsipan
Pusat Jasa Kearsipan | Direktorat SDM Kearsipan & Sertifikasi
Pusat Akreditasi

 www.anri.go.id  [ArsipNasionalRI](https://www.facebook.com/ArsipNasionalRI)  [@arsipnasionalri](https://twitter.com/arsipnasionalri)  [arsipnasionalri](https://www.instagram.com/arsipnasionalri)  [Arsip Nasional RI](https://www.youtube.com/ArsipNasionalRI) “

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

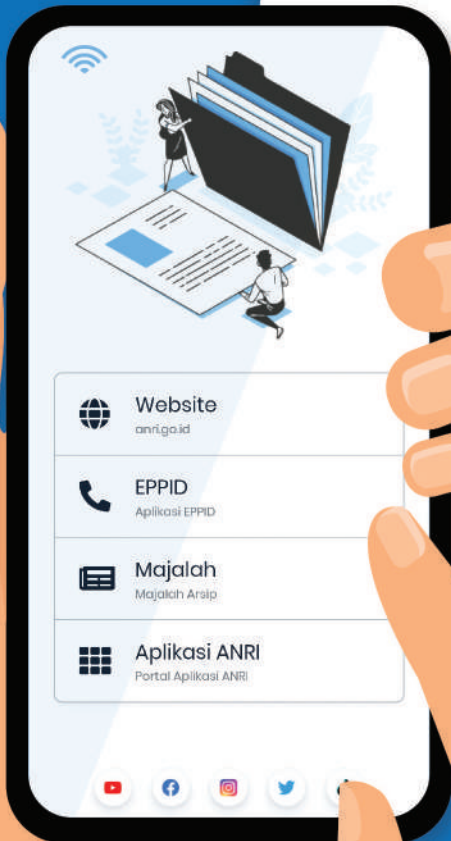


DOWNLOAD APLIKASI **klik anri**



FITUR :

- www.anri.go.id
- e-PPID ANRI
- Unduh Majalah ARSIP
- Jurnal Kearsipan
- Antrian Online
- Ruang Baca
- SRIKANDI
- Diorama Sejarah
- Perjalanan Bangsa
- JIKN
- Sejarah Nusantara
- JDIH ANRI



download sekarang di :

